

Kebijakan Reformasi dan Kerapuhan Kelembagaan Ekonomi: Ikhtiar Meluruskan Arah Perekonomian Nasional

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam
Bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya



Oleh:
AHMAD ERANI YUSTIKA

Disampaikan Pada Rapat Senat Terbuka
Universitas Brawijaya
Malang, 30 Desember 2010

Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Bismillahirrahmanirrahim,

Yth. Bapak Rektor Universitas Brawijaya

Yth. Bapak Ketua Senat Universitas Brawijaya

Yth. Bapak/Ibu Anggota Senat Universitas Brawijaya

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian dan Lembaga di Lingkungan Universitas Brawijaya

Yth. Para Dosen, Mahasiswa, Staf Administrasi, dan Para Undangan serta Hadirin yang saya muliakan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam penyelenggaraan pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Bapak rektor dan hadirin yang saya muliakan,

Selama lebih dari satu dekade ini terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional. Krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadi salah satu alasan penting terjadinya perubahan ekonomi tersebut. Pemerintah telah berbuat semampunya untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi itu, salah satunya dengan mendesain kebijakan reformasi ekonomi. Terlepas dari keberhasilan

beberapa aspek tertentu, namun reformasi ekonomi itu masih meninggalkan tumpukan masalah. Salah satu yang menjadi sumber persoalan adalah masih diabaikannya aspek kelembagaan sebagai pilar penting dalam menjalankan reformasi ekonomi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul:

Kebijakan Reformasi dan Kerapuhan Kelembagaan Ekonomi: Ikhtiar Meluruskan Arah Perekonomian Nasional

Rasanya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menelaah secara reflektif dan jernih perjalanan ekonomi Indonesia pascakrisis 1997/1998. Sekurangnya terdapat dua alasan menempatkan krisis 1997/1998 sebagai titik pijak mengkaji ulang perekonomian nasional. *Pertama*, krisis periode tersebut sangat dahsyat sehingga menghancurkan seluruh sendi perekonomian, meskipun sebenarnya pemicunya dimulai hanya dari sisi moneter, khususnya nilai tukar. Krisis itu bukan cuma mengguncang pondasi sektor finansial, tetapi juga merontokkan bangunan sektor riil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terperosok hingga minus 13,1% pada 1998 (Nasution, 2002:158). *Kedua*, setelah krisis tersebut wajah perekonomian nasional berubah secara drastis, terutama akibat kebijakan reformasi ekonomi¹. Secara normatif, lanskap perekonomian nasional menjadi lebih ramah kepada pasar, terbuka, dan terdesentralisasi. Kebijakan reformasi ini dalam prosesnya didorong oleh dua kekuatan penting: institusi eksternal maupun aspirasi domestik.

¹ Mengaitkan krisis dengan reformasi ekonomi sebetulnya merupakan hal yang alamiah karena keduanya memang saling terkait. Krisis ekonomi kerap dianggap sebagai pemicu terjadinya reformasi. Menurut Krueger (1993:109), reformasi ekonomi sendiri dilakukan ketika "kondisi ekonomi memburuk sehingga terdapat dorongan politik untuk memperbaiki kinerja ekonomi." Lihat Dani Rodrik, *Understanding Economic Policy Reform*, *Journal of Economic Literature*, Vol. 34, No. 1, 1996, hal. 26

Bapak rektor dan hadirin yang saya hormati, **Krisis Ekonomi: Dimensi Ekonomi Politik**

Sejak dekade 1980-an dinamika perekonomian dunia memang berjalan dengan cepat. Hal itu bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang (seperti terlihat pada Tabel 1). Di wilayah Asia Tenggara, misalnya dengan mengambil data 1996 (sebelum krisis 1997/1998), output ekonomi berhasil mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam rata-rata selalu di atas lima persen setiap tahunnya. Sebaliknya, yang lebih menggembirakan, tingkat inflasi berhasil ditekan kurang dari dua digit, yang sekaligus menunjukkan adanya stabilitas harga di kawasan tersebut. Dengan inflasi yang stabil membikin investor memiliki kepastian usaha, sementara bagi konsumen (masyarakat) daya belinya cukup kuat akibat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Pertemuan antara ekspektasi positif dari pemilik modal dan daya beli masyarakat inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara pada kurun waktu tersebut.²

**Tabel 1: Indikator Ekonomi Negara-negara
Asia Tenggara, 1996 - 1998 (%)**

Indikator	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
Pertum b. GDP						
1996	8,0	8,6	5,5	6,9	5,5	9,4
1997	4,7	8,0	5,1	7,8	-0,4	9,0
1998	-13,1	-5,8	-0,2	-0,2	-8,0	7,0
Inflasi						
1996	6,5	3,5	8,4	1,4	5,8	4,5
1997	11,6	2,6	5,1	2,0	5,6	4,0
1998	75,0	5,0	8,0	2,0	8,0	5,0

Sumber: Hill, 1999:6

² Bank Dunia sendiri pada 1993 menempatkan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand (plus Taiwan, Hongkong, China, dan India) sebagai negara ajaib yang pertumbuhan ekonominya sangat mencengangkan. Lihat laporan World Bank, *East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy*, World Bank Publication, 1993

Namun, secara mendadak pada pertengahan 1997 krisis ekonomi menyerang wilayah Asia dan terus merembet ke negara-negara lainnya (Stiglitz, 2004:5).Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh jatuhnya nilai tukar

Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh jatuhnya nilai tukar Bath (Thailand) terhadap US dolar pada 2 Juli 1997. Selanjutnya, depresiasi nilai tukar itu tanpa dapat diisolasi menjalar (contagion effect) secara cepat ke Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, dan lain-lain.

dan mata uangnya terdevaluasi sangat parah sebesar 600%; sedangkan di Korea Selatan harga saham turun 65% dan mata uangnya terdevaluasi sebesar 100% (Jang dan Sul, 2002:94). Dari data-data tersebut terlihat betapa parahnya dampak krisis moneter saat itu sehingga memengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, termasuk sektor riil (kronologis krisis ekonomi itu bisa dilihat pada Tabel 2).

Mengenai sumber krisis ekonomi itu sendiri banyak versi yang mengemuka. Charoenseang dan Manakit (2002:598) mengeksplorasi sekurangnya dua sudut pandang dalam melihat pemicu krisis 1997/1998. *Pertama*, pandangan yang berargumentasi bahwa fundamental ekonomi yang rapuh dan inkonsistensi kebijakan sebagai sumber utama krisis. Perspektif ini kerap disebut dengan “*first generation model*” [yang dikembangkan oleh Krugman (1979) serta Flood dan Garber (1986)] yang menjelaskan krisis mata uang (*currency*) sebagai hasil dari inkonsistensi

³ Sebetulnya krisis di Thailand tersebut sudah bermula pada Juni 1997, yang ditandai oleh jatuhnya harga-harga saham secara tajam. Lihat Hoyoon Jang dan Wonsik Sul, The Asian Financial Crisis and the Co-movement of Asian Stock Markets, *Journal of Asian Economics*, Vol. 13, 2002, hal. 95

fundamental dalam memformulasikan kebijakan ekonomi domestik. *Kedua*, keyakinan bahwa sumber krisis tidak lain adalah kepanikan yang terjadi di sektor keuangan (*financial panic*) yang berinteraksi dengan ekspektasi pelaku ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap kebijakan makroekonomi. Penjelasan ini kerap disebut dengan “*second generation model*” [yang diusung oleh Obstfeld (1996)] yang memberi penjelasan deskripsi generik hubungan teoritis antara model makroekonomi dengan ekspektasi rasional, di mana diyakini ekspektasi yang terjadi di pasar berpengaruh secara langsung terhadap keputusan membuat kebijakan ekonomi (lihat juga Roubini dan Mihm, 2010:29).

Tabel 2: Kronologis Krisis Ekonomi di Asia 1997-1998

Periode	Thailand	Indonesia	Korea Selatan
Juni 1997	(17 Jun 1): Thailand's Composite Index jatuh di bawah level 500	-	-
July	(2 Juli): Pemerintah Thailand mencoba mengelola Bath (11 Juli): Bath meluncur ke level B30/\$ (28 Juli): Thailand meminta bantuan IMF (rescue package)	-	-
Agustus	(11 Agustus): IMF menyetujui dana talangan \$17,9 miliar	(29 Agustus): Indonesia's Composite Index jatuh di bawah level 500	-
September	-	(2 Sept.): Rupiah meluncur ke level Rp3000/\$	-
Oktober	-	(8 Okt.): Indonesia meminta bantuan keuangan kepada IMF (30 Okt.): IMF mengumumkan bantuan \$23 miliar (financial package)	-
November	-	-	(7 Nov.): Korea mencoba mempertahankan Won. Won meluncur ke level W1000/\$ (21 Nov.): Korea meminta bantuan IMF (rescue package)
December	(26 Des.): Thailand's Composite Index jatuh ke level 357,1	(12 Des.): Indonesia's Composite Index jatuh ke level 339,5	(1 Des.): Korea's Composite Index jatuh di bawah level 400 (3 Dec.): IMF menyetujui dana talangan \$57 miliar (bailout package) (24 Dec.): Korea's Composite Index jatuh ke level 351,5
Januari 1998	(6 Jan.): Bath meluncur ke level B50/\$	(8 Jan.): Rupiah meluncur ke level Rp10000/\$	(12 Jan.): Won meluncur ke level W1800/\$

Sumber: Jang dan Sul, 2002:96

Dalam kasus Indonesia, pandangan “*first generation model*” itu dapat dilacak kebenarannya setelah melihat situasi fundamental ekonomi nasional. Indrawati (2002:578), misalnya, mengungkapkan periode sebelum krisis perekonomian Indonesia ditandai kerentanan di sektor perbankan maupun struktur korporasi. Usaha konglomerasi tumbuh secara agresif sehingga mendominasi seluruh kegiatan ekonomi pada hampir semua wilayah di Indonesia. Sebagian besar perbankan dimiliki oleh para konglomerat yang memanfaatkan bank tersebut untuk membiayai perusahaan satu induknya, sehingga kerap melanggar regulasi “*legal lending limit*”. Perusahaan milik

Meskipun menerapkan prinsip tata kelola yang buruk dan ketiadaan transparansi (juga akuntabilitas publik), korporasi-korporasi itu melanjutkan ekspansi usahanya dengan menggunakan utang perbankan maupun sumber lain dari luar negeri.

transparansi (juga akuntabilitas publik), korporasi-korporasi itu melanjutkan ekspansi usahanya dengan menggunakan utang perbankan maupun sumber lain dari luar negeri. Praktik ini bersua dengan tata kelola perbankan yang tidak hati-hati (*imprudent banking*) dan kebijakan kredit yang buruk sehingga menciptakan risiko finansial, baik pada perusahaan maupun bank sendiri.

Sedangkan menurut pendekatan yang kedua (*second generation model*), krisis ekonomi di Indonesia tidak akan menyebar secara cepat dan mengalami pendalaman yang parah bila pemerintah tidak mengambil keputusan melikuidasi 16 bank (sesuai anjuran IMF) pada November 1997.⁴

⁴ Kebijakan IMF sendiri secara umum dikritik karena terlalu luas cakupannya, tidak fokus, ambisius, dan tidak realistis dalam kerangka waktu, khususnya dikaitkan dengan transisi politik Indonesia yang masih rentan (saat itu) dan kapasitas pemerintah masih lemah untuk mengimplementasikan program dengan jadwal yang ketat. Lihat Sri Mulyani Indrawati, Indonesia Economic Recovery Process and the Role of Government, *Journal of Asian Economics*, Vol. 13, 2002, hal. 580

Kebijakan ini dipandang sangat menyederhanakan masalah, karena IMF merasa bank-bank tersebut tergolong kecil, hanya memberikan kontribusi sekitar 2,5% dari total aset sektor perbankan, sehingga dipastikan tidak akan menciptakan komplikasi masalah yang berlebihan (Indrawati, 2002:582). IMF tidak memerhitungkan realitas bahwa kebijakan itu diambil ketika krisis dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian (khususnya perbankan) dalam titik nadir.⁵ Akibatnya, begitu kebijakan likuidasi dilakukan terjadi penarikan uang nasabah secara besar-besaran (*rush*) sehingga perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Akumulasi dari rangkaian pengambilan kebijakan ini membuat perekonomian justru makin terpuruk dan pengambil kebijakan kehilangan kendali untuk mengatasinya.⁶

Di luar penjelasan tersebut, Hill (1999:9) mengingatkan pentingnya membedakan antara “pemicu” (*trigger*) dan “efek tular” (*contagion effect*), serta antara apa yang disebut dengan faktor “inti” (*core*) dan “sampingan” (*exacerbating*) dalam menjelaskan krisis ekonomi. Di sini penting pula ditekankan mengenai interaksi antara faktor ekonomi teknis (*technical economic*) dan ekonomi politik (*political economy*): bagaimana sistem politik dan aktor-aktor politik pada umumnya bereaksi dalam menangani krisis tersebut. Dari sudut pandang ekonomi teknis, terdapat konsensus bahwa sumber krisis adalah penerapan tingkat nilai tukar tetap/semu (*fixed or quasi-fixed exchange rates*), dalam bingkai banyaknya jumlah utang jangka pendek

⁵ Secara umum IMF dan Bank Dunia sebetulnya dipandang tidak memiliki informasi yang memadai mengenai situasi politik domestik negara yang hendak dibantu ketimbang aktor-aktor politik di negara bersangkutan. Lihat Tony Addison dan Mina Balamoune-Lutz, Economic Reform When Institutional Quality is Weak: The Case of the Maghreb, *Journal of Policy Modeling*, Vol. 28, 2006, hal. 1030

⁶ Kebijakan itu diperburuk oleh respons kebijakan moneter yang kurang tepat pada saat itu. Untuk memertahankan nilai tukar rupiah kala itu, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan amat tinggi sampai ke kisaran 70% (Juli 1998) sehingga suku bunga pinjaman pun naik dengan sangat tajam. Kebijakan tersebut memberi kesan bahwa BI sedang melakukan kebijakan moneter ketat. Padahal, sebenarnya kala itu Indonesia melakukan kebijakan uang longgar. Menurut Milton Friedman, untuk melihat suatu kebijakan moneter ketat atau longgar, maka harus melihat laju pertumbuhan suplai uang, bukan hanya memandang tingkat suku bunga saja. Saat itu laju pertumbuhan uang (*base money*) tinggi sekali, bahkan sempat mencapai di atas 100%. Kebijakan yang membingungkan itu telah memperburuk keadaan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan uang yang tinggi (di tengah permintaan riil yang menurun) menimbulkan godaan untuk berspekulasi dolar. Jadi, laju pertumbuhan uang yang tinggi pada masa itu memberi amunisi tambahan untuk menyerang rupiah. Akibatnya, rupiah pun terpuruk amat dalam dan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia pun runtuh. Lihat Purbaya Yudhi Sadewa, *Mencari Hal Positif dari Arah Ekonomi*, Kompas, 12 Juli 2010

(*short-term debt*) dan sistem keuangan (perbankan) yang rentan.⁷ Sebagian besar utang luar negeri (ULN) tersebut tidak dilindungi (*hedging*) sehingga ketika nilai tukar mata uang domestik merosot terhadap dolar, maka jumlah ULN menjadi membengkak. Sementara itu, secara politik, dalam kasus Indonesia krisis ekonomi itu dijadikan momentum menurunkan pemerintah Orde Baru yang dianggap telah keluar jauh dari amanat konstitusi, terutama dalam merumuskan kebijakan ekonomi (pada masa itu peran negara sangat eksekutif dalam perekonomian, struktur usaha yang terkonsentrasi (monopoli/oligopoli), sentralisasi manajemen ekonomi, dan patronase politik-bisnis yang tidak sehat). Implikasinya, pada saat itu terjadi kompleksitas ekonomi politik sehingga menimbulkan pendalaman krisis yang amat parah.

Reformasi mengacu kepada upaya intensif untuk mengubah beberapa elemen dari sebuah sistem (features of the system), sedangkan transisi merujuk kepada peristiwa yang terjadi selama suatu negara bergerak dari suatu pola tertentu (misalnya dalam hal hak kepemilikan) menuju ke pola lainnya

dengan “transisi”. Tetapi dalam penelusuran yang lebih detail, sesungguhnya di antara keduanya terdapat pemaknaan yang berlainan. Reformasi mengacu kepada upaya intensif untuk mengubah beberapa elemen dari sebuah sistem (*features of the system*), sedangkan transisi merujuk kepada peristiwa yang terjadi selama suatu negara bergerak dari suatu pola tertentu (misalnya dalam

⁷ Krugman secara lugas menyampaikan bahwa krisis di Asia pada saat itu sebetulnya disebabkan oleh dua faktor penting, yakni perekonomian sangat rentan akibat pembukaan pasar keuangan dan upaya mendapatkan popularitas baru dari para debitor internasional dengan jalan melakukan utang yang berlebihan. Lihat Paul Krugman, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, W.W. Norton & Company, New York, 2009, hal. 97

***Bapak rektor dan hadirin yang saya muliakan,
Reformasi Ekonomi Terbalik***

Sejak krisis ekonomi politik pada 1997/1998 itulah proyek reformasi ekonomi (dan politik) dijadi. Reformasi ekonomi dimaknai dalam pengertian yang berbeda-beda, bahkan banyak yang memberi stempel sama antara “reformasi”

hal hak kepemilikan) menuju ke pola lainnya, dan bukan berbicara mengenai proses perubahan menuju sistem yang ingin dituju (Colombatto dan Macey, 1997:4-5). Dengan pengertian semacam itu, reformasi bisa dikatakan lebih menitikberatkan pada perubahan kebijakan, sebaliknya transisi menekankan pada kejadian-kejadian yang berlangsung akibat munculnya perubahan kebijakan.

Sampai di sini, barang kali tidak ada lembaga internasional yang paling berpengaruh melebihi institusi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mempromosikan reformasi ekonomi (Hayami, 2003:40; Shafaeddin, 2005:3; Addison dan Bali moune-Lutz, 2006:1029).⁸ Kedua lembaga ini merupakan bentukan saat berlangsung Konferensi Bretton Woods seusai Perang Dunia II, dengan tujuan utama merekonstruksi infrastruktur dunia dan membantu pembangunan negara-negara anggota. Menarik untuk dicermati bahwa kedua institusi ini juga memiliki fungsi lain yang penting, yakni menghadang pengaruh negara-negara sosialis dalam memperluas ide dan sistem ekonominya, terutama ke negara dunia ketiga (Kloby, 1997:171-172). Sehingga, tidaklah mengherankan bila sejak awal lembaga tersebut sangat getol menyalurkan dana (utang luar negeri) ke negara-negara dunia ketiga dengan persyaratan yang cukup lunak (*soft loan*), yaitu bunga ringan dan tenggang pembayaran (*gestation period*) yang lama.

Williamson mengkompilasi kebijakan-kebijakan yang bertujuan menformulasikan kebijakan reformasi ekonomi tersebut dengan sebutan Konsensus Washington (*Washington Consensus*). Konsensus Washington ini didasarkan pada upaya stabilisasi ekonomi lewat jalur kebijakan penyesuaian struktural (*structural adjustment*)⁹ yang direkomendasikan oleh organisasi

⁸ Secara prinsip, sebenarnya ada perbedaan tugas yang jelas antara IMF dan Bank Dunia. Fungsi IMF dibatasi pada urusan ekonomi makro (*macroeconomics*), yang di antaranya lebih banyak bersinggungan dengan aspek defisit anggaran pemerintah, kebijakan moneter, inflasi, defisit perdagangan, dan utang luar negeri. Sedangkan Bank Dunia lebih banyak berurusan dengan isu-isu struktural (*structural issues*), seperti bagaimana pemerintah harus mengalokasikan anggarannya, kelembagaan keuangan negara, pasar tenaga kerja, dan kebijakan perdagangan. Lihat Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, Penguin Books, England, 2002, hal. 14

⁹ Balassa mendefinisikan penyesuaian struktural sebagai “respons kebijakan untuk menyikapi aneka kejutan/gangguan eksternal (*external shocks*), yang dilakukan dengan tujuan mengembalikan jalur pertumbuhan ekonomi domestik seperti sebelum terjadi krisis.” Selama periode penyesuaian, pertumbuhan biasanya mengalahkan distribusi dan produksi meminggirkan tujuan keadilan sosial. Lihat Biplab Dasgupta, *Structural Adjustment, Global Trade, and the New Political Economy of Development*, Zed Books, New York, 1998, hal. 66

Bretton Woods dan pengambil kebijakan ekonomi pemerintah AS. Konsensus Washington menekankan kepada pembuatan kebijakan finansial dan makro ekonomi yang hati-hati (*prudent*), nilai tukar mata uang yang kompetitif, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi (Rodrik, 1996:17; McCleery dan De Paolis, 2008:438). Kebijakan itu secara implisit mengajak pemerintah/negara menahan diri untuk tidak turut campur langsung dalam kegiatan ekonomi, melainkan justru lebih memfokuskan

Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada strategi “bottom-up” serta menempatkan reformasi pada level mikro ekonomi, seperti reformasi kelembagaan (reformasi di sektor pertanian dan reformasi usaha-usaha industri) dan reformasi harga; mendahului reformasi pada level makro ekonomi (kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi perdagangan luar negeri).

kepada kebijakan moneter, menjamin hak kepemilikan (*property rights*), dan menyiapkan infrastruktur pendidikan dasar.¹⁰

Dalam implementasinya, terdapat dua kubu dalam mendesain reformasi ekonomi, yakni kubu Asia dan kubu Eropa Timur. “Pendekatan Asia” cenderung mendesain reformasi ekonomi lewat penahapan yang berurutan. Ghai (1997:33) menyebut dengan istilah “gradual tetapi sistematis”. Pendekatan ini

¹⁰ Terdapat pengalaman dari dua negara yang menyelenggarakan proses penyesuaian berbeda, yang bermanfaat sebagai pedoman pembelajaran. *Pertama*, penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Chile dan dikenal sebagai “*shock therapy*”. Program penyesuaian ini didesain untuk mengatasi krisis ekonomi yang berujung pada perjuangan politik dan krisis minyak. Paket kebijakan tersebut antara lain pengurangan secara tajam pengeluaran pemerintah, pemindahan subsidi, PHK (pemutusan hubungan kerja) pada sektor publik, mengeliminasi kontrol kuantitatif terhadap alokasi sumber daya, liberalisasi perdagangan dan pasar modal, penyatuan tingkat nilai tukar mata uang, privatisasi perusahaan negara, dan kebijakan di sektor pertanian. Akibat kebijakan yang serba drastis tersebut muncul beberapa implikasi ekonomi jangka pendek, seperti penurunan yang cepat dalam kegiatan ekonomi dan upah riil, eskalasi pengangguran yang sangat tinggi, dan peningkatan jumlah orang miskin. *Kedua*, program penyesuaian ekonomi Kuba yang memiliki dua target secara bersamaan, yakni memfasilitasi capaian sosial untuk revolusi dan mengamankan karakter sosialis dalam perekonomiannya. Pada awal krisis, dari 1989 sampai 1993, kebijakan penyesuaian yang dikeluarkan adalah pengurangan penggunaan energi, penurunan investasi, pengetatan barang-barang konsumen, dan penguatan sektor ekonomi tertentu (seperti pariwisata, bioteknologi, produksi makanan, dan investasi asing). Setelah itu, penyesuaian yang diambil pada 1993 bertujuan untuk penguatan produksi dan fleksibilitas perekonomian melalui transformasi pertanian milik negara ke bentuk koperasi, sewa lahan kepada petani individual, pemberian otoritas kepada pasar pertanian sehingga harga produk tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, legalisasi pekerja mandiri dalam kegiatan ekonomi maupun kepemilikan aset, dan penggunaan dolar di pasar domestik. Dengan kebijakan penyesuaian seperti ini, sejak 1995-1996 pertumbuhan ekonomi Kuba mulai stabil. Lihat Dharam Ghai, *Social Development and Public Policy: Some Lessons from Successful Experiences*, UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development), Discussion Paper, 1997, No. 89, hal. 34-35

lebih menitikberatkan kepada strategi “*bottom-up*” serta menempatkan reformasi pada level mikro ekonomi, seperti reformasi kelembagaan (reformasi di sektor pertanian dan reformasi usaha-usaha industri) dan reformasi harga; mendahului reformasi pada level makro ekonomi (kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi perdagangan luar negeri). Sebaliknya, “Pendekatan Eropa Timur” cenderung mengerjakan reformasi ekonomi lewat perubahan yang radikal (*big-bang approach*), seperti tampak dalam perubahan hak kepemilikan, penghapusan kontrol harga, serta liberalisasi nilai tukar dan perdagangan (Ghai, 1997:33).¹¹

Berikutnya, dalam mendesain perbaikan kinerja perusahaan, khususnya perlakuan terhadap BUMN, pendekatan Asia lebih banyak menempuh upaya-upaya perluasan otonomi dan akuntabilitas. Sedangkan di negara-negara Eropa Timur lebih menyukai cara privatisasi untuk mereformasi kinerja BUMN. Dari kasus ini bisa ditarik sebuah pernyataan bahwa negara-negara Asia menganggap yang diperlukan sebuah korporasi untuk mengembangkan diri adalah adanya otonomi dan akuntabilitas, bukan terletak pada masalah kepemilikannya: apakah dipunyai oleh negara atau swasta. Sebaliknya, negara-negara Eropa Timur memandang pasar (swasta) akan lebih mampu secara efektif dan efisien memajukan sebuah perusahaan dibandingkan apabila dikelola oleh negara. Tampak di sini terdapat basis asumsi yang berbeda di antara dua pendekatan tersebut dalam meningkatkan kinerja BUMN-nya.¹²

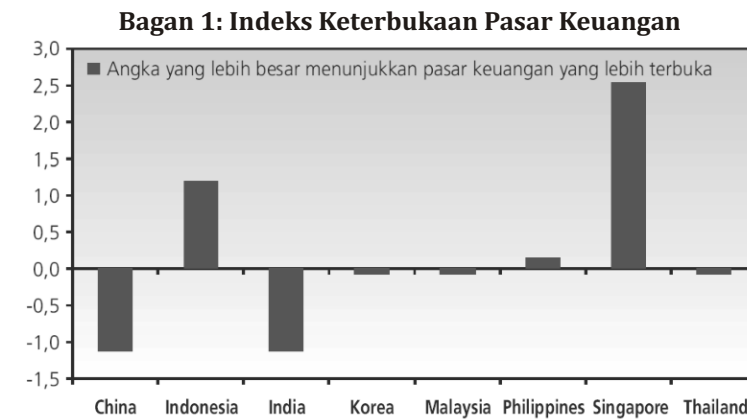
¹¹ Penulis lain menggunakan istilah *evolutionary and radical approaches* sebagai padanan reformasi gradual dan *big-bang*. Pendekatan radikal dimaknai sebagai perubahan yang cepat, merusak tatanan yang lama, konversi organisasi yang cepat menuju praktik ekonomi kapitalis di negara-negara maju. Sementara itu, *evolutionary approach* dimaksudkan sebagai perubahan yang tidak terlalu cepat dalam meredesain organisasi lama, tetapi dengan tetap menumbuhkan sektor privat dalam kegiatan ekonomi. Lihat Peter Murrel, *Evolutionary and Radical Approaches to Economic Reform*, *Economics and Planning*, Vol. 25, 1992, hal. 80-82

¹² Lebih dari itu terdapat beberapa penemuan penting lagi sebagai penjelasan atas terjadinya reformasi ekonomi Asia dan Eropa Timur. Penjelasan itu antara lain adalah: (i) sektor pertanian dan industri menengah/kecil bisa dipakai sebagai dasar keuntungan (*advantage*) bagi perekonomian nasional; (ii) asumsi bahwa pasar bebas akan bisa berjalan secara cepat (*overnight*) adalah salah. Langkah penahapan secara terukur adalah kondisi yang penting untuk menuju kepada evolusi ke sistem pasar; (iii) penciptaan kesempatan berusaha bagi BUMS dan mengembangkan perilaku berusaha (*corporate governance*) bagi BUMN lebih penting daripada privatisasi; (iv) kebijakan perdagangan yang berorientasi ekspor akan meningkatkan efisiensi dan daya saing (*competitiveness*), serta meningkatkan prospek investasi dan pertumbuhan; (v) reformasi secara gradual bisa berjalan hanya apabila situasi sosial politik mendukung; dan (vi) kebijakan fiskal dan moneter kurang penting pada jangka pendek dan menengah. Reformasi kelembagaan dan harga lebih berguna pada fase ini. Dharam Ghai, *op. cit.*, hal. 33

Berkaitan dengan program reformasi ekonomi di Asia tersebut, kasus privatisasi di Vietnam menarik untuk dicermati. Seperti diketahui, sebagian besar BUMN di Vietnam adalah usaha yang berskala kecil atau menengah. Agenda reformasi di Vietnam menghendaki adanya evaluasi ekonomi yang komprehensif terhadap seluruh BUMN, baik menyangkut konsolidasi utang, proyek acuan privatisasi, dan formasi unit usaha besar. *Pertama*, seluruh BUMN diwajibkan melakukan daftar ulang untuk bisa melanjutkan operasi perusahaan secara legal. Komite Perencanaan Nasional bertanggung jawab mengevaluasi proposal dan memutuskan mana perusahaan yang memiliki potensi berkembang tanpa harus dibantu. *Kedua*, pada 1995 manajemen sentralistik BUMN digantikan dengan supervisi langsung di bawah departemen baru (Departemen Keuangan). Pada saat yang sama UU Perusahaan Negara diubah dengan memberikan otonomi manajerial yang lebih besar, memperbaiki supervisi terhadap BUMN, dan membatasi tanggung jawab keuangan negara untuk tujuan komersial BUMN. *Ketiga*, pada 1996 sekitar setengah dari BUMN dikelompokkan dalam 18 perusahaan induk yang terkenal sebagai "Perusahaan Umum". *Keempat*, proyek percontohan privatisasi didesain pada awal 1992, di mana kurang lebih 10 industri BUMN dijual kepada pekerja dalam bentuk kepemilikan saham dan investor luar (Diehl, 1998:53-54).¹³

Agenda reformasi di Vietnam menghendaki adanya evaluasi ekonomi yang komprehensif terhadap seluruh BUMN, baik menyangkut konsolidasi utang, proyek acuan privatisasi, dan formasi unit usaha besar.

¹³ Pengalaman Portugal juga bisa menjadi bahan pembelajaran, di mana privatisasi yang dikerjakan harus berada dalam kerangka hukum yang diciptakan sebelumnya dengan beberapa tujuan pokok. Setidaknya ada 7 tujuan penting dari proyek privatisasi di Portugal: (i) memodernisasi perusahaan melalui peningkatan daya saing dan kebutuhan restrukturisasi; (ii) penguatan kapasitas kewirausahaan nasional; (iii) pengurangan peran negara dalam perekonomian; (iv) pengembangan pasar modal; (v) perluasan bagian kepemilikan bagi warga Portugal (pribumi); (vi) menjaga kepentingan negara dalam perekonomian; dan (vii) mengurangi beban utang negara dalam perekonomian. Lihat Stephen C.R. Munday, *Current Developments in Economics*. MacMillan Press Ltd., London, 1996, hal. 72-73



Sumber: Bank Indonesia, 2009

Jika deskripsi di atas direlasikan dengan situasi Indonesia, maka di sini justru mempraktikkan reformasi ekonomi terbalik, di mana pemerintah menggeber perombakan pada level makro ekonomi terlebih dulu, persis seperti yang dijalankan di Eropa Timur. *Pertama*, pemerintah mengubah secara drastis hak kepemilikan sumber daya ekonomi menuju kepemilikan swasta (*private property rights*), termasuk sumber daya ekonomi yang seharusnya dimiliki dan dikuasai oleh negara. *Kedua*, kontrol harga dilepas satu per satu, khususnya yang berkenaan dengan komoditas pertanian, padahal kelembagaan produksi dan distribusi belum sepenuhnya disentuh pemerintah. Implikasinya, harga komoditas pangan melambung tetapi penikmatnya adalah pelaku ekonomi di sektor hilir (bukan petani). *Ketiga*, liberalisasi dijalankan secara ekstensif, baik di sektor perdagangan maupun investasi asing (Kuncoro dan Resosudarmo, 2006:350). Liberalisasi itu mengikuti keterbukaan sektor keuangan yang telah dilakukan sejak lama (lihat Bagan 1) sehingga membuat perekonomian menjadi lebih mudah terguncang apabila terjadi instabilitas eksternal. Dalam soal keterbukaan ini, indeks keterbukaan pasar keuangan Indonesia berada pada posisi kedua tertinggi setelah Singapura pada 2006. Sebaliknya, pasar keuangan di China dan

India sangat ketat. *Keempat*, strategi privatisasi lebih dipilih pemerintah untuk membangun kultur korporasi dan efisiensi BUMN. Pemerintah meyakini sektor swasta (domestik atau asing) lebih mampu memperbaiki kinerja BUMN yang sedang sekarat.

Dalam soal keterbukaan ini, indeks keterbukaan pasar keuangan Indonesia berada pada posisi kedua tertinggi setelah Singapura. Sebaliknya, pasar keuangan di China dan India sangat ketat.

Secara lebih sistematis, jika reformasi ekonomi Indonesia dibuat dalam hirarkhi, maka dapat dibaca dari tiga level berikut. *Pertama*, reformasi ekonomi pada lapis makro dimulai pada dekade 1980-an ketika beberapa sektor ekonomi (manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain) dideregulasi dan diliberalisasi cukup massif (McCawley, 2002:262; Indrawati, 2002:578). Perkembangan sektor perbankan dan pasar modal menjadi penanda penting dari hasil deregulasi itu, sehingga hidup mati kegiatan ekonomi dan perilaku rumah tangga tidak lepas dari perkembangan sektor keuangan tersebut.¹⁴ Deregulasi dan liberalisasi itu disusul pada sektor riil dan perdagangan, saat dikeluarkannya PP No. 20/1994 tentang “Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka PMA” yang memberi keleluasan pelaku ekonomi asing menerobos sudut-sudut perekonomian nasional. Peraturan itu dirancang untuk menjawab kebutuhan investasi yang sangat besar (demi menafkahi tujuan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja), sementara modal dan pelaku ekonomi

¹⁴ Meskipun terlambat, Pemerintah Indonesia akhirnya juga memberikan independensi kepada bank sentral (Bank Indonesia) pada 1999. Secara teoritis, dalam arena pembuatan kebijakan makroekonomi, reformasi ekonomi memang salah satunya harus dimulai dari bank sentral. Beberapa studi menunjukkan bahwa independensi bank sentral dengan mandat yang jelas untuk melakukan stabilisasi harga menghasilkan kinerja makroekonomi yang baik (Alesina dan Summers, 1993; Cukierman, *et. al.*, 1992). Oleh karena itu, otoritas bank sentral harus diubah dengan memberikan mandat hanya kepada pengendalian inflasi daripada tujuan lain yang lebih luas tapi berpotensi saling bertubrukan (*conflicting objectives*). Sungguh pun begitu, Fischer (1995) mengingatkan bahwa independensi bank sentral hanya merujuk kepada “*independensi instrumen*” dan bukan “*independensi tujuan*.” Bank sentral tidak disarankan memiliki independensi untuk menentukan tujuannya sendiri, tetapi diharapkan dibatasi hanya menjalankan tujuan yang telah ditetapkan secara jelas. Lihat Anis Chowdhury, *Political Economy of Macroeconomic Management: The Need for Institutional Change*, *International Journal of Social Economics*, Vol. 26, No. 1/2/3, 1999, hal. 398

domestik dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Kedua, reformasi ekonomi pada level meso, yakni mendesain manajemen pembangunan ekonomi (politik) yang mulai didesentralisasi, yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Manajemen sentralisasi di masa lalu dipandang sebagai sumber macetnya pembangunan ekonomi, padahal potensi yang seharusnya dicapai jauh lebih besar dari yang telah digapai. Sasaran desentralisasi ekonomi (fiskal) di Indonesia secara umum adalah (Simanjuntak, 2002:165): (i) memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; (ii) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah; (iii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; (iv) mengurangi ketimpangan antardaerah; (v) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; dan (vi) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Meskipun model ini dipandang memiliki risiko politik yang cukup besar (di antaranya isu separatisme), namun tetap dipilih karena dianggap sebagai jalan paling rasional untuk mengurus ekonomi (politik) Indonesia.

Ketiga, reformasi pada level mikro perekonomian berjalan secara sehat, yang dirumuskan dalam UU No. 5/1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Sebelum periode 1997/1998, perekonomian nasional dikenal sangat distortif karena penguasaan ekonomi digenggam oleh segelintir pelaku ekonomi. Struktur ekonomi yang sangat monopolis dan oligopolis merupakan pemandangan jamak pada hampir semua sektor perekonomian nasional sebelum masa reformasi ekonomi.¹⁵ Implikasi dari praktik ekonomi tersebut membuat daya saing ekonomi rendah, akses sebagian besar pelaku ekonomi tertutup, dan masyarakat

¹⁵ Studi yang dilakukan oleh Kuncoro dan Abimanyu pada 1995 menyebutkan bahwa 7 dari 9 sub-sektor industri manufaktur di Indonesia memiliki rasio konsentrasi di atas 40%, sehingga tergolong terkonsentrasi atau oligopolis. Hanya industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan produk kayu yang memiliki konsentrasi relatif rendah, yakni antara 13-14%. Sedangkan untuk industri sub-sektor makanan, minuman, tembakau, kertas, kimia, barang galian bukan logam, logam dasar, barang dari logam, mesin dan peralatannya, dan pengolahan lain menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi, yakni antara 40-82%. Lihat Mudrajad Kuncoro dan Anggito Abimanyu, *Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Liberalisasi: Sebuah Catatan Empiris*, FE UGM, Yogyakarta, 1995, tidak dipublikasikan

Struktur ekonomi yang sangat monopolis dan oligopolis merupakan pemandangan jamak pada hampir semua sektor perekonomian nasional sebelum masa reformasi ekonomi.

(konsumen) dirugikan. Oleh karena itu, perubahan sistem persaingan ekonomi merupakan terapi mujarab untuk merancang ekonomi ke arah persaingan yang sehat sehingga semua pelaku ekonomi memiliki akses yang sama, masyarakat (konsumen) diuntungkan, dan daya saing diharapkan meningkat.

Bapak rektor dan hadirin yang saya hormati, Ongkos Reformasi Ekonomi

Harus diakui telah banyak kemajuan ekonomi yang dicapai berkat kebijakan reformasi ekonomi yang didesain selama satu dekade terakhir. Keberhasilan paling mencolok adalah pencapaian stabilitas makroekonomi pada satu dekade terakhir, meskipun sempat diinterupsi pada tahun-tahun tertentu akibat turbulensi ekonomi, seperti 2005 dan 2008. Pada 2005 perekonomian sempat limbung akibat kenaikan harga minyak dan pangan di pasar internasional. Akibatnya, pada tahun itu inflasi bertengger pada angka 17,11%. Sementara itu, pada 2008 terjadi megakrisis finansial dengan episentrum di Amerika Serikat akibat kasus *subprime mortgage* (Stiglitz, 2010:2). Krisis ini juga menikam perekonomian Indonesia cukup dalam, seperti turunnya ekspor, goyahnya sektor keuangan/perbankan, dan perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Bahkan, dikemudian hari krisis 2008 itu memunculkan problem perbankan yang berujung menjadi isu politik, yakni kasus Bank Century. Namun, terlepas dari peristiwa 2005 dan 2008 itu, stabilitas makroekonomi relatif terjaga, hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga acuan, nilai, tukar, dan lain-lain (Tabel 3).

Tabel 3: Indikator Makroekonomi Indonesia 2000-2010

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,5	6,2	6,1	4,5
PDB Nominal (Harga Berlaku/Rp Miliar)	2.774.281,1	3.339.216,8	3.950.893,2	4.951.356,7	5.613.441,7
Inflasi (%)	17,4	6,6	6,59	11,06	2,78
Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.850	9.197	9.376	10.450	9.447
BI Rate (%)	12,75	9,75	8,00	9,25	6,5
Penduduk Miskin (Juta jiwa)	35,10	39,10	37,20	34,96	32,53
Penduduk Miskin (%)	15,9	17,6	16,6	15,42	14,15
Pengangguran Terbuka (%)	11,24	10,26	9,11	8,39	8,14

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sungguh pun begitu, terdapat soal ekonomi lain yang belum dapat dipecahkan, bahkan dalam beberapa aspek tertentu terjadi pemburukan, meskipun proyek reformasi ekonomi telah dijalankan lebih dari satu dekade. *Pertama*, terdapat tendensi yang makin nyata pertumbuhan (tinggi) yang dicapai diiringi dengan naiknya ketimpangan pendapatan antar-individu/kelompok maupun antardaerah.¹⁶ Realitas ini tentu menyedihkan, karena dengan begitu kebijakan reformasi hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi atau sebagian daerah. *Kedua*, deregulasi dan liberalisasi dianggap sebagai instrumen mujarab untuk meningkatkan

Deregulasi dan liberalisasi dianggap sebagai instrumen mujarab untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, namun efisiensi dan daya saing ekonomi nasional justru tidak bergerak maju secara proporsional dengan percepatan liberalisasi.

¹⁶ Data BPS menunjukkan, pada 1971 PDRB Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 54,5% terhadap PDB, diikuti Sumatera (29,0%), Sulawesi (6,0%), Kalimantan (5,4%), Bali dan Nusa Tenggara (3,4%), serta Maluku dan Papua (1,7%). Pada 2008 sebagian besar kontribusi PDRB daerah tersebut mengalami penurunan, kecuali Jawa dan Kalimantan. Secara lebih detail, pada 2008 sumbangan PDRB Jawa (60,7%), Sumatera (21,6%), Kalimantan (8,8%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta Maluku dan Papua (1,6%). Sebagai catatan, distribusi kontribusi PDRB ini tidak memasukkan Timor Timur. Lihat Suahazil Nazara, *Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, 10 Maret 2010, hal. 12, tidak dipublikasikan

efisiensi ekonomi, namun efisiensi dan daya saing ekonomi nasional justru tidak bergerak maju secara proporsional dengan percepatan liberalisasi.¹⁷ Ketiga, akses angkatan kerja masuk ke sektor formal semakin sempit sehingga proporsi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal bertambah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, persaingan usaha yang telah diatur belum mampu mendongkrak kapasitas ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja sangat sedikit.

Terdapat dua argumen penting untuk menelisik kegagalan sebagian program reformasi ekonomi di Indonesia tersebut. *Pertama*, analisis yang fokus kepada pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi. Pendekatan ini meyakini bahwa pilihan kebijakan reformasi antarnegara tidak bisa dibikin seragam karena masing-masing negara mempunyai karakteristik dan problem ekonomi yang berlainan. Model reformasi ekonomi “Asia” dan “Eropa Timur”, seperti yang telah diulas di muka, merupakan respons terhadap karakteristik ekonomi yang berbeda antarnegara tersebut. *Kedua*, alasan lemahnya desain dan penegakan kelembagaan (*rules of the game*) sebagai “kaki” dari kebijakan yang telah diproduksi. Pendekatan ini pada level

¹⁷ Hal paling mendasar yang dilupakan pemerintah adalah bahwa perekonomian yang berbasis pasar tetap perlu aturan main (kelembagaan) yang rinci sehingga pasar dapat bekerja sesuai amanat yang dipanggul. Dalam perekonomian yang berbasis pasar, fungsi terpenting kelembagaan bisa dipilah dalam tiga klasifikasi berikut: (i) meregulasi pasar (*market regulating*), khususnya untuk mengatasi persoalan-persoalan eksternalitas (*externalities*), skala ekonomi (*economies of scale*), dan informasi yang tidak sempurna (*imperfect information*). Contoh dari regulasi pasar termasuk peraturan di bidang telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan; (ii) menstabilisasi pasar (*market stabilizing*), yang bertujuan menurunkan inflasi, meminimalisasi volatilitas makro ekonomi, dan mencegah krisis keuangan. Contoh dari stabilisasi pasar ini adalah pemapanan bank sentral, rezim nilai tukar, serta aturan fiskal dan anggaran; dan (iii) melegitimasi pasar (*market legitimizing*), yakni kebijakan untuk menopang ‘kegagalan pasar’, seperti asuransi dan perlindungan sosial, redistribusi, dan manajemen konflik. Kebijakan-kebijakan yang bisa diciptakan antara lain: sistem pensiun, skema asuransi pengangguran, dan dana sosial lainnya. Lihat Dani Rodrik dan Arvind Subramanian, *The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean)*, *Finance and Development*, Vol. 40, No. 2, June 2003, hal. 32

makro (*institutional environment*) berkonsentrasi kepada penyusunan kerangka hukum, ekonomi, dan politik agar kebijakan yang diproduksi bisa menjawab tujuan yang ditargetkan [(Tian, 2001:387; Kherallah dan Kirsten, 2001:4)].

Secara definitif, kelembagaan itu sendiri bisa dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) [Rutherford, 1994:1]. North (1994:360) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam pengertian yang kurang lebih sama, Yeager (1999:9) secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian yang inheren dalam interaksi manusia melalui penciptaan pola perilaku (Pejovich, 1995:30). Termasuk dalam kelembagaan adalah efektivitas penegakan hak kepemilikan (*property rights*), kontrak dan jaminan formal, *trademarks*, *limited liability*, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoalan-persoalan *agency*, dan –seperti yang ditekankan oleh Williamson– kontrak yang tidak lengkap dan oportunistik pasca-kontrak (*ex-post opportunism*) [Bardhan, 1996:4].

Kembali kepada soal reformasi ekonomi, pengalaman di China dan India barangkali bisa dijadikan pijakan untuk melakukan perbandingan. Reformasi ekonomi di China diawali pada 1978 dan dilanjutkan pada awal 1980-an, yang fokus kepada pembukaan perdagangan internasional dan pengenalan tanggung jawab kontrak (*contract responsibilities*) pada aktivitas di sektor pertanian. Dengan sistem ini, petani diarahkan menjual surplus komoditasnya ke pasar, yang dibantu dengan pemapanan *Township-Village Enterprises* (TVEs). Selanjutnya, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, reformasi ekonomi difokuskan kepada penciptaan sistem harga (*pricing*

system), yang dicapai lewat sistem harga dua jalur (*dual track pricing system*) dan pengurangan peran negara dalam alokasi sumber daya (ekonomi). Pemerintah China juga mulai mendiversifikasi sistem kepemilikan badan usaha yang memberi tempat bagi swasta maupun modal asing. Pada periode ini China juga mengenalkan pembangunan zona ekonomi khusus (*special economic zone/SEZ*)),¹⁸ terutama di Shanghai Pudong, yang kelak di kemudian hari menjadi lokomotif ekonomi China (Hu, 2005:5).¹⁹

Sementara itu, reformasi ekonomi di India dapat dibagi dalam beberapa babak berikut. *Pertama*, mengurangi praktik monopoli pada semua sektor industri agar sektor privat bisa bergerak lebih leluasa. *Kedua*, reformasi perdagangan internasional digalakkan sejak 1991 dengan cara mencabut lisensi impor dan digantikan dengan lisensi umum terbuka (*open general licencing*). Meskipun kebijakan ini terkesan sangat liberal, namun dalam praktiknya hanya mencakup 30% impor. Tarif impor juga diturunkan secara dramatis, di mana dulunya 60% tarif impor berada dalam rentang 110-150% (bahkan paling tinggi ada yang mencapai 400%) dan hanya 4% yang tarif impornya di bawah 60%. Saat ini, tarif impor yang paling tinggi 45% dengan rata-rata tarif kurang dari 25%. *Ketiga*, reformasi ekonomi juga dilakukan pada area infrastruktur, terutama jalan, rel kereta api, dan pelabuhan agar terjadi perbaikan pada kualitas dan pelayanan, tapi disadari dalam perjalanannya kemajuan pembangunan infrastruktur ini sangat lamban (Panagariya, 2002:2-4)

¹⁸ Daerah-daerah berikutnya yang dikembangkan menjadi SEZ antara lain Tianjin, Shenzhen, Guangzhou, dan Dalian. Lihat Jude Howell, *China Opens Its Doors: The Politics of Economic Transition*, Lynne Rienner Publishers, USA, 1993, hal. 104

¹⁹ Dalam sudut pandang yang lain, Qian (2003) mendeskripsikan empat faktor kunci sukses China dalam menaklukkan proses transisi ekonomi. *Pertama*, mendesain pendekatan dua jalur (*dual-track approach*) liberalisasi yang tetap memberlakukan kuota dan kontrol harga produksi sampai pada jumlah yang direncanakan (sebelum reformasi), namun membebaskan harga ketika produksi telah melewati rencana. *Kedua*, memformulasikan TVEs sebagai mekanisme melindungi hak kepemilikan yang terdesentralisasi ketika negara (pusat) tidak bisa menjamin bentuk lain yang lebih formal. *Ketiga*, memperjelas mekanisme desentralisasi pemerintahan. *Keempat*, mencegah terjadinya penyimpangan komitmen sektor perbankan dan mengurangi kemungkinan pemerintah memanfaatkan perbankan untuk hal-hal yang tidak semestinya melalui pengurangan aliran informasi. Lihat Peter Murrell, *Institutions and Firms in Transition Economies*. Dalam Claude Menard dan Mary M. Shirley (eds.), *Handbook of New Institutional Economics*, Springer, The Netherlands, 2005, hal. 689

Table 4: Kebijakan Perdagangan Indonesia, 1966-95

Periode	Posisi Kebijakan Kaum Tekokrat	Peran dalam Pengambilan Kebijakan	Posisi Kebijakan Kelompok Ekonom Nasionalis	Peran dalam Pengambilan Kebijakan	Posisi Kebijakan Rent seekers ¹	Peran dalam Pengambilan Kebijakan	Posisi Kebijakan Lembaga Luar Negeri	Peran dalam Pengambilan Kebijakan	Capaian Kebijakan Perdagangan
1966-72	Pro-pasar	Moderat	Proteksionis	Moderat	Proteksionis	Kuat	Pro-pasar	Moderat	Relatif liberal
1973-82	Adopsi ISI, meskipun masih relatif pro-pasar	Menurun	Proteksionis	Kuat	Proteksionis	Kuat	Pro-pasar	Menurun	Proteksionis
1982-85	Mulai mendukung liberalisasi ekonomi	Meningkat	Proteksionis	Menurun, meskipun relatif masih kuat	Proteksionis	Kuat	Pro-pasar	Moderat	Ambivalen
1985-90	Pro-pasar dan mendukung reformasi perdagangan	Kuat	Proteksionis	Menurun	Cenderung memilih kebijakan proteksionis	Kuat	Pro-pasar	Meningkat	Relatif liberal
1990-95	Pendekatan pro-pasar dan mendukung reformasi perdagangan	Menurun	Proteksionis	Meningkat	Cenderung memilih kebijakan proteksionis	Kuat	Pro-pasar	Relatif kuat ²	Relatif liberal

Catatan: ISI = industri substitusi impor

1. Berada di sekeliling rezim militer Soeharto dan birokrasi pada 1970-an, dan terkonsentrasi sekitar Soeharto pada 1980-an
2. Meningkatkan karena pentingnya peran organisasi perdagangan seperti APEC dan AFTA

Sumber: Basri dan Hill, 2002:319

Dalam kasus Indonesia, reformasi gelombang pertama justru menyentuh sektor keuangan, khususnya kontrol modal. Sejak awal masa Orde Baru kontrol modal sudah dilepas sehingga arus modal asing (portofolio maupun investasi langsung) berseliweran secara bebas. Hal itu diteruskan pada dekade 1980-an ketika sektor perbankan diberi keleluasaan membuka cabang dan kemudahan bank asing beroperasi di Indonesia. Kebijakan liberalisasi sektor keuangan ini dijalankan saat sektor perdagangan masih diselimuti oleh praktik proteksi dan iklim monopoli yang pekat.²⁰ Tabel 4 menunjukkan secara jelas sampai 1995 (sebelum krisis 1997/1998) kebijakan perdagangan masih bersemangat proteksionis. Pada saat itu, peran kaum teknokrat yang pro-pasar cenderung menurun dan kelompok ekonom nasionalis menguat, sehingga kebijakan proteksi memperoleh pangsungnya. Dengan kata lain, liberalisasi sektor keuangan di Indonesia mendahului sektor perdagangan (berbeda dengan China dan India).

**Tabel 5: Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi
2007-2009**

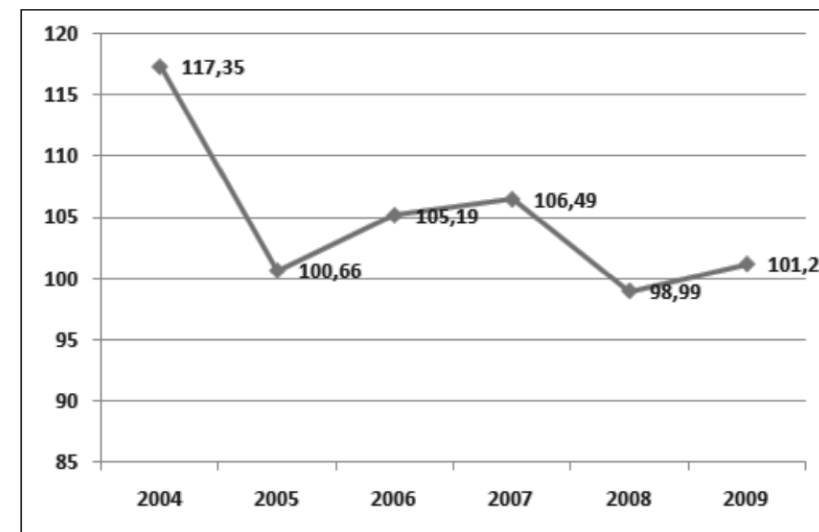
Sektor	2007	2008	2009	Persentase
Pertanian	41.206.474	41.331.7064	43.029.493	41,18
Pertambangan dan penggalian	994.614	1.070.540	1.139.495	1,09
Industri Pengolahan	12.368.729	12.549.376	12.615.440	12,07
Listrik, Gas, dan Air	174.884	201.114	209.441	0,20
Konstruksi	5.252.581	5.438.965	4.610.695	4,42
Perdagangan, Hotel dan restoran	20.554.650	21.221.744	21.836.768	20,90
Transportasi dan Telekomunikasi	5.958.811	6.179.503	5.947.673	5,69
Keuangan, Asuransi, Perumahan dan Jasa	1.399.940	1.459.985	1.484.598	1,42
Masyarakat, Sosial dan Jasa Pribadi	12.019.984	13.099.817	13.611.841	13,03
Total	99.930.667	102.552.750	104.485.444	100,00

Sumber: Diolah dari BPS, berbagai terbitan

²⁰ Dalam kasus ini Indonesia dianggap menerapkan urutan yang salah dalam proses liberalisasi. McKinnon (1973, 1993) menyatakan kontrol modal seharusnya merupakan fase terakhir dari proses liberalisasi, setelah liberalisasi keuangan, perbankan, dan perdagangan. Di Indonesia, setelah kontrol modal dilepas, sektor perbankan justru melanjutkan tradisi represi dan intervensi yang intensif. Bank sentral jauh dari praktik independen, baik dalam hal menjalankan kebijakan moneter maupun meregulasi/mensupervisi bank. Liberalisasi parsial sektor perbankan pada pertengahan dekade 1980-an memang telah menambah jumlah bank secara drastis, namun diiringi dengan kelemahan struktur dan kepemilikan bank-bank tersebut. Pada saat yang sama, sektor riil masih ditandai dengan kebijakan yang distortif, misalnya proteksi tarif yang tinggi, kompetisi yang tidak adil, serta praktik monopoli dan oligopoli yang massif. Lihat Sri Mulyani Indrawati, *op. cit.*, hal. 578

Berikutnya, basis perekonomian Indonesia berada di sektor pertanian, industri, dan perdagangan (kontribusinya terhadap PDB hampir mencapai 60% dan penyerapan tenaga kerja sekitar 71%, seperti yang terlihat pada Tabel 5) dengan masalah utama rata-rata kepemilikan lahan yang sempit di sektor pertanian (dan posisi tawar petani yang lemah), *local content* yang rendah di sektor industri, dan dominasi pelaku ekonomi skala ekonomi besar di sektor perdagangan. Dalam agenda reformasi ekonomi, problem itu diatasi dengan kebijakan pelepasan kontrol harga pada sebagian besar komoditas pertanian, promosi *non-tradeable sector*, dan penciptaan akses yang luas bagi sektor perdagangan besar untuk membuka usaha sampai ke level kecamatan/desa. Kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang tidak memengaruhi kinerja makroekonomi, bahkan dalam beberapa hal justru menopang pertumbuhan ekonomi secara pesat, namun dengan mengorbankan sasaran ekonomi lainnya.

Grafik 2: Nilai Tukar Petani 2004-2009



Sumber: Diolah dari BPS, 2010

Implikasi serius dari kebijakan reformasi ekonomi tersebut bisa dibaca dari lima tampilan berikut. *Pertama*, liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen menafkahi kepentingan sektor keuangan itu sendiri, bukan menumbuhkan sektor riil. Sebagian dana perbankan (domestik maupun asing) tidak disalurkan dalam wujud kredit, tapi diparkir ke SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SUN (Surat Utang Negara). Laporan BI menunjukkan sampai Mei 2010 dana perbankan yang ditaruh di SBI mencapai

Liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen menafkahi kepentingan sektor keuangan itu sendiri, bukan menumbuhkan sektor riil.

Rp 253,6 triliun, ditempatkan di Fasilitas Simpanan BI (FASBI) sejumlah Rp 47 triliun, dan diinvestasikan ke surat-surat berharga (plus piutang lainnya) sebesar Rp 333,3 triliun (BI, 2010:33). *Kedua*, petani makin

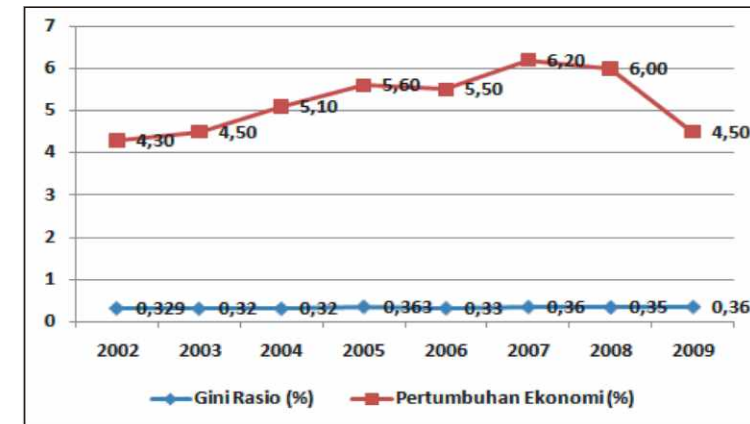
terjerembab karena kontrol harga dilepas, sementara penentu harga (*price maker*) adalah pedagang/ distributor. Hasilnya, harga komoditas melambung, tapi nisbah ekonomi terbesar tidak jatuh ke petani²¹ (pernyataan ini didukung oleh NTP yang terus merosot, seperti terlihat pada Grafik 2). *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh *non-tradeable sector* yang *import content*-nya tinggi dan penyerapan tenaga kerjanya rendah.²² Akibatnya, impor terus bertambah dan sektor informal kian membengkak (sebagai penampung tenaga kerja yang tidak dapat masuk ke sektor formal). *Keempat*, marginalisasi pelaku ekonomi tradisional dan skala kecil akibat kalah bersaing dengan pelaku ekonomi besar di sektor

²¹ Data BPS terbaru mewartakan angka kemiskinan 2010 turun tipis menjadi 13,33% (pada 2009 mencapai 14,15%). Dengan begitu, jumlah orang miskin pada 2010 mencapai 31,02 juta penduduk. Namun, walaupun persentase kemiskinan turun, tapi persentase jumlah orang miskin di pedesaan justru meningkat (dari 63,35% pada 2009 menjadi 64,23% pada 2010). Fakta ini merupakan konfirmasi yang meyakinkan bahwa pembangunan (ekonomi) selama ini cenderung meminggirkan wilayah pedesaan, khususnya yang bekerja di sektor pertanian. Lihat Ahmad Erani Yustika, *Kemiskinan dan Dualisme Ekonomi*, Jawa Pos, 13 Juli 2010

²² Sektor manufaktur di Indonesia masih tergantung dari bahan baku impor yang tinggi, terentang dari mulai 10,9% (industri kertas dan produk kertas) sampai 63,7% (industri peralatan telekomunikasi). Bahkan untuk industri peralatan rumah tangga dan kantor pun masih tergantung bahan baku impor sebesar 56,7%. Ini yang membuat sebagian nilai tambah komoditas manufaktur lari ke luar negeri. Lihat Mohamad Ikhsan Modjo, *Proyeksi Ekonomi 2010*, makalah dipresentasikan pada seminar Indef Economic Outlook 2010, Jakarta, 25 Januari 2010, tidak dipublikasikan

perdagangan.²³ *Kelima*, akumulasi dari rangkaian kebijakan reformasi ekonomi tersebut membuat ketimpangan pendapatan meningkat seiring laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (seperti yang terlihat pada Grafik 3, Rasio Gini meningkat hingga mencapai 0,36 pada 2009).²⁴ Lima implikasi ini merupakan "*cost of economic reform*" yang harus ditanggung masyarakat.²⁵

Grafik 3: Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Indonesia 2002-2009



Sumber: Diolah dari BPS, 2010

²³ Riset AC Nielsen pada 2007 menunjukkan pertumbuhan pasar tradisional secara nasional minus 8,1 persen, sementara laju pertumbuhan pasar modern secara nasional mencapai 37 persen. Lihat Harian Ekonomi Neraca, *Pemda Harus Kendalikan Pertumbuhan Ritel Modern*, 3 September 2010

²⁴ Rasio Gini berada dalam rentang 0 - 1, di mana 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 bermakna ketimpangan sempurna. Sungguh pun begitu, data Rasio Gini Indonesia tersebut tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Brazil 0,57 (2005), Malaysia 0,46 (2002), Filipina 0,46 (2006), India 0,37 (2004) ataupun China (2007). Lihat Suahazil Nazara, *op. cit.*, hal. 8

²⁵ Di luar itu, tidak dapat disangkal bila proses reformasi ekonomi sarat dengan rintangan-rintangan politik yang seringkali tidak ramah. Setidaknya ada tiga palang/rintangan politik (*political barriers*) yang kerap terjadi untuk menilik perjalan reformasi ekonomi. *Pertama*, kebijakan reformasi ekonomi yang menyentuh barang-barang publik (*public goods*) selalu menimbulkan masalah penunggang gelap (*free-rider*), sehingga pada titik ini sangat mungkin bagi munculnya tindakan kolektif (*collective action*). Jika penunggang gelap reformasi tersebut mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka reformasi ekonomi berpotensi mengalami kegagalan. *Kedua*, dalam pandangan model distributif (*distributive model*) kebijakan reformasi diasumsikan akan didukung oleh kelompok pemenang (*the winners*) dan sekaligus akan dilawan oleh kelompok pecundang (*the losers*), sehingga hasil dari reformasi ekonomi sangat tergantung dari kekuatan politik di antara koalisi pemenang. *Ketiga*, masalah klasik dari reformasi ekonomi adalah biaya reformasi biasanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, tetapi keuntungannya menyebar kepada banyak kelompok sehingga keberhasilannya sangat tergantung seberapa kuat perlawanan dari kelompok yang paling terkena dampak reformasi tersebut. Lihat Stephen Haggard dan Robert R. Kaufman, *The Political Economy of Democratic Transitions*, Princeton University Press, New Jersey, 1995, hal. 156-157

Bapak rektor dan hadirin yang saya muliakan, Kerapuhan Kelembagaan Makro

Selain argumentasi tentang pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi yang salah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan (*institutional reform*).²⁶ Dalam perspektif ini, kebijakan reformasi ekonomi membutuhkan kelembagaan²⁷ yang lebih detail, sehingga tanpa adanya kelembagaan yang solid seluruh kebijakan yang didesain akan berhenti di tengah jalan. Pada titik ini, reformasi kelembagaan merupakan “*enabling environment*” yang

Ketiga aspek kelembagaan itu tidak lain adalah kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform), sistem hukum (legal system reform), dan politik (political reform)

membuat kebijakan reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Sekurangnya terdapat tiga aspek reformasi kelembagaan pada level makro (*institutional environment*) yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi.

Ketiga aspek kelembagaan itu tidak lain adalah kelembagaan reformasi administrasi (*administrative reform*), sistem hukum (*legal system reform*), dan politik (*political reform*) [Chowdhury, 1999:389].

Salah satu spirit reformasi ekonomi adalah memberi tempat yang layak kepada pasar untuk menjalankan misi percepatan kegiatan ekonomi

²⁶ Reformasi kelembagaan dalam ruang lingkup yang paling luas dimaknai sebagai perubahan-perubahan yang menekankan kepada relasi negara-masyarakat, hubungan pusat-daerah, dan kaitan negara-partai. Lihat Scott Fritzen, Growth, Inequality and the Future Poverty Reduction in Vietnam, *Journal of Asian Economics*, Vol. 13, 2002: 635-657

²⁷ Dari sudut pandang teoritis, sekurangnya terdapat 3 pendekatan besar dalam studi kelembagaan. *Pertama*, “*the historical perspective*” yang dikembangkan oleh North (1990). *Kedua*, “*comparative institutional analysis*” yang diformulasikan oleh Aoki (2001). *Ketiga*, “*imperfect information theory*” yang dielaborasi oleh Bardhan (2000). Lihat Francesca Gagliardi, Institutions and Economic Change: A Critical Survey of the New Institutional Approaches and Empirical Evidence, *The Journal of Socio-economics*, Vol. 37, 2008, hal. 418

dengan basis efisiensi. Implikasi paling serius dari semangat ini tentu bukan menghilangkan peran pemerintah, namun justru melakukan pilihan intervensi yang tepat dengan cakupan yang lebih terbatas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, reformasi ekonomi menghendaki pemerintahan yang kuat tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang terbatas (*strong but limited government*). Cakupan yang terbatas dimaknai pemerintah dan organ yang menjalankannya (baca: birokrasi) hanya masuk ke area di mana pasar tidak dapat bekerja atau mengalami kegagalan (*market failure*). Dengan kata lain, bukanlah peranan negara yang minimal (*minimal state*), melainkan dibutuhkan negara yang kapabel (*capable state*) demi membuat reformasi kebijakan yang berorientasi pasar dapat dijalankan (Ahrens, 2000:84).²⁸ Ini tentu berkebalikan dengan praktik yang dijalankan sebelum masa reformasi ekonomi di Indonesia, di mana peran pemerintah masuk ke hampir semua lekuk kegiatan ekonomi, namun dengan kapasitas pemerintah (birokrasi) yang tidak memadai. Oleh karena itu, justru pada momentum reformasi ekonomi kapasitas dan kompetensi administrasi menjadi sangat penting sehingga tidak boleh dilalaikan.²⁹ Dengan demikian, reformasi administrasi (*administrative reform*) di sini dimaknai sebagai upaya sadar dan sengaja untuk memperbaiki birokrasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (ekonomi) nasional (Shah, 2002:1).

Reformasi ekonomi menghendaki pemerintahan yang kuat tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang terbatas (strong but limited government).

²⁸ Menurut Sen, memang amat sulit (bahkan tidak mungkin) proses pembangunan (ekonomi) dapat dilakukan tanpa keterlibatan pasar secara ekstensif. Namun, pasar tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan sosial, regulasi publik, atau keterlibatan negara yang nantinya akan memperkaya kualitas kehidupan manusia. Lihat Amartya Sen, *Development as a Freedom*, Anchor Books, New York, 1999, hal. 7

²⁹ Studi yang dilakukan di China menunjukkan bahwa kualitas pemerintah yang bagus merupakan salah satu syarat hadirnya FDI (*foreign direct investment*). Di sini, kelembagaan yang mapan juga membutuhkan mutu pemerintah yang baik, yang berarti mempersyaratkan adanya politisi dan birokrat yang berkualifikasi tinggi. Lihat Joseph P.H. Fan *et. al.* Institutions and Foreign Direct Investment: China versus the Rest of the World, *World Development*, Vol. 37, No. 4, 2009, hal. 855

Tabel 6: Masalah Utama Daya Saing Beberapa Negara

Masalah Daya Saing	China	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand	Filipina
Inefisiensi birokrasi pemerintah	15,3	20,2	11,3	3,4	13,3	20,6
Keti dalcukupan ketersediaan infrastruktur	2,8	14,8	5,5	6,2	2,8	15
Instabilitas kebijakan	19,9	9	8,5	1,1	15,4	12,6
Korupsi	0,9	8,7	10,4	0,8	11	24,3
Akses pendanaan	9,7	7,3	12,8	12,6	7,2	5,2
Restriksi regulasi tenaga kerja	8,8	7,1	6,4	15,1	1,9	2,4
Regulasi pajak	9	6,8	4,9	9,4	6,3	4,8
Inflasi	6,7	6,1	4,4	20,3	2	0,6
Regulasi mata uang asing	6,5	5,2	3	4,8	1,8	0
Keti dalcukupan tenaga kerja terdidik	1,6	4,7	8	11,9	6,7	0,7
Etika kerja yang lemah dalam angkatan kerja	1,2	3,7	7,9	5,7	3,5	2
Instabilitas pemerintah/ <i>coups</i>	2,8	3,6	3,1	0	23,7	2,8
Tingkat pajak	14,5	1,9	6,9	7,9	2,9	3,3
Kesehatan masyarakat yang rendah	0	0,5	1	0,4	0,2	2,4
Kejahatan dan pencurian	0,2	0,4	5,9	0,3	1,4	3,3

Keterangan: Warna lebih gelap menunjukkan masalah terbesar

Sumber: Diolah dari WEF, 2009

Masalahnya, aspek reformasi administrasi-birokrasi ini justru nyaris tidak disentuh dalam desain besar reformasi ekonomi di Indonesia. Laporan yang dilansir oleh *World Economic Forum* (2009) secara jelas mengungkapkan penyebab daya saing ekonomi Indonesia yang rendah diakibatkan oleh inefisiensi birokrasi. Pada aspek ini, Indonesia ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga (seperti Malaysia, Thailand, China, dan Singapura). Indonesia hanya sedikit lebih bagus ketimbang Filipina pada aspek ini. Padahal, bila dilihat pada aspek yang lain, semisal instabilitas kebijakan, akses pendanaan, dan inflasi; posisi Indonesia sangat bisa bersaing dengan negara-negara

tersebut (Tabel 6). Inilah yang kemudian membuat prosedur dan biaya memulai bisnis di Indonesia menjadi tidak efisien (meskipun telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir). Saat ini lama memulai bisnis di Indonesia pada 2009 masih 60 hari (hanya lebih bagus daripada Kamboja dan Timor Leste) dan ongkos memulai bisnis mencapai 26% dari pendapatan per kapita (cuma lebih murah ketimbang Kamboja dan Filipina) [Tabel 7].³⁰ Jadi, kebijakan reformasi ekonomi yang bersemangat deregulasi dalam derajat tertentu sudah benar, tapi karena tidak ditopang oleh kelembagaan administrasi yang mapan mengakibatkan kebijakan itu tidak dapat berjalan (secara efektif).

Berikutnya, pokok soal dalam kegiatan ekonomi yang penting adalah kejelasan hak kepemilikan (*property rights*) dan respek terhadap aturan hukum/*rule of the law* (termasuk penegakannya/*law enforcement*) sebagai faktor mendasar yang menentukan stabilitas makroekonomi, pengembangan pasar modal, pembangunan sektor usaha, dan investasi dalam inovasi (Fan *et. al.*, 2009:853). Seperti yang telah disinggung di muka, kegagalan pasar merupakan keniscayaan dalam ekonomi yang berbasis pasar. Di luar faktor eksternalitas, barang publik, dan praktik monopoli/oligopoli, dalam

Saat ini lama memulai bisnis di Indonesia pada 2009 masih 60 hari (hanya lebih bagus daripada Kamboja dan Timor Leste) dan ongkos memulai bisnis mencapai 26% dari pendapatan per kapita (cuma lebih murah ketimbang Kamboja dan Filipina).

³⁰ Laporan *World Economic Forum* yang terbaru menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia meningkat cukup drastis dari semula peringkat 54 (2009) menjadi 44 (2010), meskipun masih tertinggal cukup jauh dari Malaysia (peringkat 26), Brunei Darussalam (peringkat 28), dan Thailand (peringkat 38). Beberapa pilar yang membuat daya saing Indonesia tertinggal dengan negara lain adalah karena masalah kelembagaan, infrastruktur, dan pendidikan. Sedangkan pilar yang dianggap cukup bagus dalam mendongkrak daya saing Indonesia ialah lingkungan makroekonomi, pengembangan bisnis, dan ukuran pasar. Sementara itu, faktor yang dianggap paling problematik dalam menjalankan bisnis di Indonesia masih didominasi oleh inefisiensi birokrasi dan korupsi. Lihat Klaus Schwab (ed.), *The Global Competitiveness Report 2010-2011*, World Economic Forum, Switzerland, 2010, hal. 184-185

pandangan ekonomi neoklasik kegagalan pasar kerap terjadi akibat ketidakjelasan hak kepemilikan (Caporaso dan Levine, 1993:92). Jika hak kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi diberikan kepada privat (terlepas dari kontroversi di baliknya), maka hal itu akan menjadi sumber terpenting bagi munculnya produksi dan kreativitas ekonomi. Kejelasan hak kepemilikan juga membuat transaksi lebih mudah dilakukan karena masing-masing pelaku ekonomi memiliki kepastian tentang status suatu barang/jasa; demikian sebaliknya. Selanjutnya, hak kepemilikan itu dijamin kepastiannya melalui sistem legal yang kukuh untuk mencegah munculnya pelaku ekonomi yang berbuat curang, seperti pencurian, penjiplakan, pembajakan, dan lain-lain.

Tabel 7: Indikator Biaya Memulai Bisnis pada Beberapa Negara

	Jumlah prosedur memulai bisnis	Jumlah hari memulai bisnis	Biaya (% dari pendapatan per kapita)	Modal Minimal (% dari pendapatan per kapita)
Singapura	3	3	0,7	0
Thailand	3	3	6,3	0
Indonesia	9	60	26	59,7
Kamboja	9	85	138,4	36,3
Malaysia	9	11	11,9	0
Timor-Leste	10	83	4,1	202,9
Vietnam	11	50	13,3	0
Filipina	15	52	28,2	5,5
Rata-rata OECD	5,7	13	4,7	15,5
Asia Pasifik	8,1	41,1	25,8	21,3

Sumber: World Bank, 2009

Pada titik ini, investasi yang terjadi disuatu negara bukan hanya fungsi dari tingkat suku bunga, ekspektasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun pasokan kredit. Dalam tradisi kelembagaan, investasi juga berkaitan

dengan seberapa jauh pemerintah (melalui sistem hukumnya) mampu melindungi investor dari praktik-praktik pencurian hak cipta, penjiplakan, pembajakan, dan lain sebagainya (Nelson, 2008:6). Dalam kasus Indonesia, di sinilah masalah itu muncul, yakni ketidakmampuan sistem legal memproteksi investor dari perilaku menyimpang (*opportunism*) pelaku ekonomi lainnya. Pencurian hak cipta, penjiplakan, dan pembajakan merupakan hal yang wajar dalam keseharian kegiatan ekonomi, sementara sistem legal tidak sanggup memberikan penalti terhadap pihak yang berperilaku menyimpang. Implikasinya, insentif ekonomi untuk melakukan investasi menjadi berkurang.³¹ Praktik ini terjadi pada hampir semua sektor ekonomi sehingga secara makro menyebabkan rasio kredit terhadap PDB di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Tabel 8 mewartakan rasio kredit terhadap PDB di Indonesia hanya sekitar 26,5%, sangat jauh dibandingkan dengan Thailand (88,4%), Malaysia (116,1%), Singapura (112,8%), dan Korsel (93,2%). Jadi, meskipun pemerintah Indonesia berhasil melakukan

Tabel 8: Rasio Kredit Bank dan Aset Sektor Keuangan terhadap PDB 2009

Negara	Rasio Kredit Bank terhadap PDB (%)	Rasio Aset Sektor Keuangan terhadap PDB (%)
Indonesia	26,5	80,5
Malaysia	116,1	351,9
Filipina	36,3	152,0
Thailand	88,4	183,7
Singapura	112,8	553,2
Korsel	93,2	200,1

Sumber: CEIC Data; dalam Bank Indonesia, 2010

³¹ Studi yang dilakukan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada 2010 menyebutkan Indonesia memiliki catatan terburuk dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Asia (peringkat paling buncit dari 12 negara Asia yang disurvei). Skor Indonesia mencapai 8,5 (skor 10 paling buruk dalam melindungi hak kekayaan intelektual). Secara lebih lengkap, Singapura memimpin daftar dengan skor 1,5, diikuti oleh Jepang (2,1), Hong Kong (2,8), Taiwan (3,8) dan Korea Selatan (4,1). Di ujung lain dari skala yang buruk, Vietnam kedua terburuk (8,4), China (7,9), Filipina (6,84), India (6,5), Thailand (6,17), dan Malaysia 5,8. Lihat Media Indonesia, *Pembajakan di Indonesia Tertinggi di Asia*, 25 Agustus 2010

stabilitas makroekonomi, namun akibat jaminan hak kepemilikan yang keropos menyebabkan insentif investasi menjadi menurun (di samping alasan lainnya, misalnya keterbatasan infrastruktur).

Terakhir, pekerjaan rumah dianggap berakhir ketika reformasi politik telah dijalankan. Makna reformasi politik yang betul bukan hanya secara prosedur sudah mengadopsi unsur-unsur penting dari demokrasi, seperti pemilihan umum yang terjadwal, eksistensi parlemen, dan pelembagaan

Di sini diandaikan jika kegiatan ekonomi sudah dideregulasi dan sistem politik telah demokratis, maka patronase antara politisi dan birokrat dapat dibatasi dalam sistem ekonomi yang dipandu oleh pasar (market-driven economic system).

ekonomi sudah dideregulasi dan sistem politik telah demokratis, maka patronase antara politisi dan birokrat dapat dibatasi dalam sistem ekonomi yang dipandu oleh pasar (*market-driven economic system*). Padahal, semua itu hanya bisa terjadi bila sistem politik demokratis tersebut dilengkapi dengan aturan main dan norma yang jelas (*well-defined rules and norms*) sehingga sistem tersebut dapat mengakomodasi aspirasi politik rakyat (Chowdhury, 1999:398). Sebaliknya, jika sistem politik demokratis itu tidak ditopang dengan aturan main yang rinci, maka agenda reformasi ekonomi berpotensi ditelikung oleh *political rent-seekers*.³²

Jika postulat itu dibawa ke konteks politik di Indonesia, maka akan dijumpai realitas berikut. Program atau proyek pembangunan yang ditaruh

³² Di dalam masyarakat yang demokratis (secara substansial), kekuasaan politik terdistribusikan secara lebih merata dan pelaku yang lebih lemah memiliki kesempatan mencegah elite berperilaku sebagai pemegang kuasa mutlak (*monopoly power*) di pasar. Beberapa kasus di negara berkembang yang merefleksikan ketidakseimbangan kuasa politik dan ekonomi menghasilkan kelembagaan ekonomi-pasar yang tidak menyediakan akses setara terhadap pemanfaatan sumber daya ekonomi. Lihat Antonio Savoia, *et. al.*, Inequality, Democracy, and Institutions: A Critical Review of Recent Research, *World Development*, Vol. 38, No. 2, 2010, hal. 146

dalam almari anggaran negara (APBN/APBD) sebagian habis dibagi untuk pengelola/pejabat negara atau kerabatnya. Lebih dramatis lagi, proyek pembangunan itu diberikan kepada "*political fund managers*" yang sebelumnya menjadi sponsor pemenang salah satu kontestan pemilu yang kemudian menjadi pemimpin (daerah/pusat). Implikasinya, proyek itu tidak mungkin dijalankan sesuai *term of reference* karena birokrasi telah kehilangan simpul terpenting dalam proses penilaian sebuah proyek: monitoring dan evaluasi. Jadi, jika sampai sekarang infrastruktur ekonomi selalu dalam kondisi buruk sehingga mengganggu iklim investasi, maka alasannya sebetulnya bukan karena pemerintah tidak punya dana. Di lapangan, sebenarnya yang terjadi sebagian (besar) anggaran itu dipotong dan dibagi-bagi kepada para pemburu rente tersebut, yang kemudian disisakan sedikit untuk proyek pembangunan yang sesungguhnya. Inilah sebagian dari kedangkalan dan kerapuhan kelembagaan makro yang dijalankan Indonesia selama satu dekade terakhir ini.

Bapak rektor dan hadirin yang saya hormati,

Kerapuhan Kelembagaan Mikro

Di luar agenda kegagalan menciptakan perubahan kelembagaan makro yang menjadi *enabling environment* perjalanan reformasi ekonomi, masalah kelembagaan juga muncul pada level mikro (*institutional arrangement*). Reformasi ekonomi yang tujuan besarnya adalah menciptakan stabilitas makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, disiplin fiskal, dan lain-lain menghendaki dukungan kelembagaan yang rinci agar pencapaian stabilitas makroekonomi tersebut berjalan dalam koridor yang benar. Dalam beberapa kasus, stabilitas makroekonomi yang dicapai disuatu negara dapat terjadi di tengah problem-problem ekonomi yang mendasar, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Hal ini bisa berlangsung karena output ekonomi itu dapat dicapai lewat dua kaki, yaitu kebijakan dan kelembagaan. Fungsi kebijakan menunjukkan arah/target/tujuan ekonomi (misalnya

Fungsi kebijakan menunjukkan arah/target/tujuan ekonomi (misalnya pertumbuhan ekonomi), sedangkan kelembagaan mendesain tata cara bagaimana tujuan itu hendak dicapai.

pertumbuhan ekonomi), sedangkan kelembagaan mendesain tata cara bagaimana tujuan itu hendak dicapai. Jadi, meskipun kebijakan ekonomi yang diproduksi oleh dua negara sama, tapi output ekonomi bisa berlainan akibat perbedaan kelembagaan yang digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Tabel 9: Target Ekonomi, Tindakan, dan Kelembagaan pada Beberapa Level

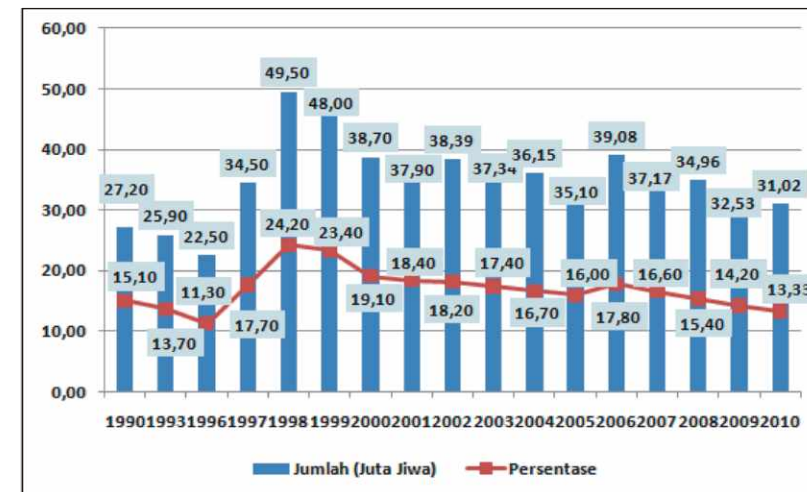
Aspek/Level	Makro	Mikro	Meso
Target	Stabilitas	Efisiensi	Inovasi
Variabel kunci	Uang, nilai tukar	Harga	Pengetahuan
Tindakan	Manajemen negara	Pilihan individu	Interaksi
Kelembagaan formal	Bank sentral, kewenangan anggaran negara	Hak kepemilikan, aturan keluar dan masuk pasar	Infrastruktur, sistem pendidikan, asosiasi perdagangan
Kelembagaan informal	Reputasi, konsensus sosial terhadap cara pandang perilaku	Tata kelola perusahaan, perilaku rasional individu	Sikap terhadap risiko, faktor mobilitas, perilaku menabung

Sumber: Diehl, 1998:51

Pada titik ini menjadi penting dibuat target, variabel kunci, tindakan pada berbagai level, dan jenis kelembagaan yang dibutuhkan dalam setiap menjalankan kebijakan (reformasi) ekonomi. Sekadar ilustrasi, Tabel 9 mendeskripsikan bagaimana suatu pendalaman kelembagaan mesti dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi. Khusus mengenai perubahan kelembagaan formal, tampak bahwa pada level makro harus terdapat peraturan yang tegas berkenaan dengan fungsi dan kewenangan bank sentral serta pemberdayaan anggaran negara untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sedang pada level mikro, perubahan kelembagaan formal yang

dibutuhkan adalah aturan hak kepemilikan sehingga terdapat kepastian berusaha serta pedoman ke luar dan masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Tentu saja target dari perubahan kelembagaan mikro ini adalah mencoba menurunkan biaya transaksi.³³ Tidak berhenti sampai di sini, perubahan kelembagaan informal juga harus dikreasikan sehingga, baik secara makro maupun mikro, turut menyokong tujuan perubahan kelembagaan formal. Seperti yang terlihat, masalah reputasi, konsensus sosial, perilaku individu, dan sikap terhadap risiko menjadi perhatian penting dari perubahan kelembagaan informal ini (Diehl, 1998:51).

Grafik 4: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1990-2010



Sumber: Statistik Indonesia & Data Sosial Ekonomi, BPS (berbagai tahun)

³³ Furubotn dan Richter (seperti dikutip oleh Benham dan Benham, 2000:368) mendefinisikan biaya transaksi sebagai ongkos untuk menggunakan pasar (*market transaction costs*) dan biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (*orders*) di dalam perusahaan (*managerial transaction costs*). Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (*political transaction costs*). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut dua tipe: (1) biaya transaksi 'tetap' (*'fixed' transaction costs*), yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*); dan (2) biaya transaksi 'variabel' (*'variable' transaction costs*), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Lihat Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, Bayumedia, Malang, 2008, hal. 83

Di sini akan diulas secara singkat, mengapa reformasi ekonomi di Indonesia menghasilkan stabilitas makroekonomi yang relatif bagus, namun dengan meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.³⁴ *Pertama*, meskipun dana dan segepok kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan data yang impresif (Grafik 4).³⁵ Pada 1990, persentase kemiskinan sebesar 15,1% atau setara 27,2 juta penduduk kala itu. Pada 2010, persentase penduduk miskin sebesar 13,33% (31,02 juta jiwa). Jadi, selama 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada kemajuan dalam mengatasi kemiskinan karena persentase penduduk miskin tidak banyak mengalami penurunan). Hal ini dapat terjadi karena pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung (*direct policies*) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).³⁶ Seperti yang tertera dalam Bagan 1, yang bisa memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi (pendapatan) adalah jenis kelembagaan dan kebijakan (ekonomi). Dalam kasus ini, pilihan kebijakan ekonomi semacam perdagangan internasional (pengenaan tarif untuk produk pertanian), fleksibilitas nilai tukar (d disesuaikan dengan daya saing produksi nasional), penciptaan lapangan

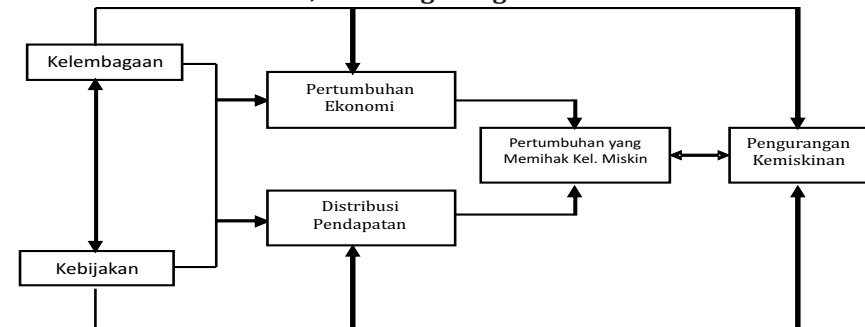
³⁴ Ahli ekonomi pembangunan yang cukup termasyhur, Dudley Seers, lebih dari 40 tahun lalu telah menyatakan bahwa jika di suatu negara terdapat salah satu atau lebih dari masalah berikut ini, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran; maka pembangunan yang dijalankan di negara tersebut berada di dalam masalah yang besar. Lihat Dudley Seers, *The Meaning of Development*, paper dipresentasikan dalam "the Eleventh World Conference of the Society for International Development", New Delhi, 4-17 November 1969

³⁵ Pada 2005 pemerintah menganggarkan Rp 23 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran ini naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 66,2 triliun pada 2009. Selama kurun waktu 2005-2009 total dana yang telah digulirkan untuk mengatasi kemiskinan sebesar Rp 245,2 triliun. Tetapi, anggaran tersebut hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang dari 2 persen (tepatnya 1,8 persen) dari 16,0 persen (2005) menjadi 14,2 persen (2009). Ini artinya efektivitas pemanfaatan anggaran untuk pengurangan kemiskinan sangat rendah karena hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan kurang dari 2 persen dalam waktu 5 tahun.

³⁶ Pada periode 1980-1993 Indonesia (bersama dengan Malaysia) dimasukkan sebagai kasus negara terbaik (*best case*) yang dalam waktu bersamaan dapat memadukan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Sebaliknya, Rusia (1980-1993) merupakan kasus terburuk (*worst case*) karena memperoleh pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan pendapatan tinggi. China (1985-1993) dan Thailand (1981-1992) pertumbuhan ekonominya tinggi, namun pemerataan pendapatannya jelek. Sedangkan Srilanka (1981-1990) pemerataan pendapatan bagus, namun pertumbuhan ekonominya rendah. Lihat Scott Fritzen, *Growth, Inequality and the Future of Poverty Reduction in Vietnam*, *Journal of Asian Economics*, Vol. 13, 2002, hal. 651

kerja (*public expenditure*), pajak progresif dan sistem pengupahan yang adil; akan menjamin bahwa setiap tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin (*pro-poor growth*) [Deolalikar, *et. al*, 2002:7]. Sementara itu, kelembagaan yang mesti dipersiapkan antara lain aturan main hubungan antarpelaku ekonomi (misalnya di sektor pertanian), mengurangi dominasi pedagang lokal, menghidupkan aset orang miskin yang mati,³⁷ dan lain-lain. Harus diakui dengan rendah hati pekerjaan inilah yang terabaikan oleh pemerintah selama ini.

Bagan 1: Hubungan antara Kelembagaan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengurangan Kemiskinan



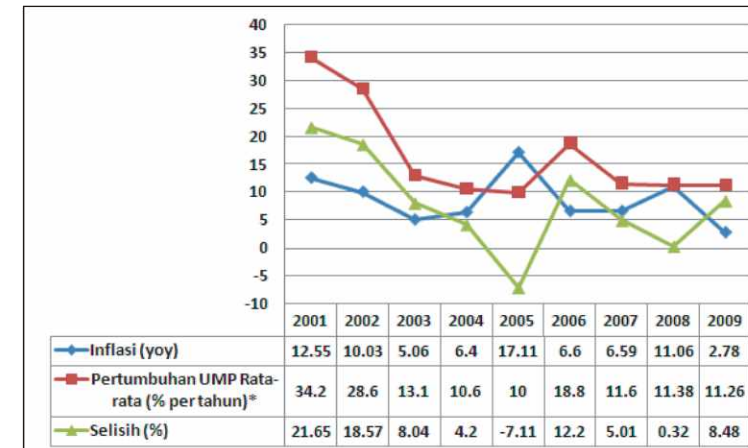
Sumber: Deolalikar, *et. al*, 2002:7

³⁷ Kaum miskin sebetulnya memiliki aset yang dapat dikonversi untuk transaksi ekonomi, misalnya mengajukan kredit ke perbankan. Masalahnya, aset orang miskin itu dalam kondisi "mati". Misalnya, tanah atau rumahnya tidak bersertifikat, usahanya tidak memiliki izin, dan seterusnya. Seandainya itu bisa dihidupkan, maka aset tersebut dapat dipakai untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga berkontribusi terhadap program pengurangan kemiskinan. Lihat Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Black Swan. Second Edition, 2001, hal. 7. Cara lainnya adalah dengan mengatasi "hukuman kemiskinan" (*poverty penalty*) yang dialami oleh penduduk miskin dalam rupa kuatnya monopoli lokal, ketiadaan akses, distribusi yang buruk, dan dominasi kelas pedagang tradisional (*traditional intermediaries*). Lihat C.K. Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*, Pearson Education, Inc., USA, 2006, hal. 11

Kedua, di bagian awal sudah dinyatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi lahan yang subur bagi peningkatan ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif kelembagaan hal ini dapat dijelaskan lewat dua cara: (i) inflasi sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan bank sentral, yang celakanya inflasi tersebut sangat merugikan kelompok miskin karena sebagian sumbernya berasal dari harga pangan yang meningkat³⁸ (kelompok miskin sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi pangan). Pemerintah tidak dapat mengatasi inflasi pangan karena kelembagaan produksi dan distribusi pertanian tidak disentuh; (ii) terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi dan upah minimum (provinsi) semakin tipis. Beberapa tahun lalu (misalnya 2001), persentase kenaikan upah minimum jauh lebih besar ketimbang inflasi, namun dalam beberapa tahun terakhir (misalnya 2008) proporsi kenaikan inflasi nyaris sama dengan kenaikan upah minimum (Grafik 5). Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena tidak ada kelembagaan dalam bentuk statuta formal yang dibuat pemerintah untuk mengatur proporsi kenaikan upah minimum tersebut; dan (iii) liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu saku ke saku lainnya (pemilik modal) tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi riil (investasi). Perekonomian memang tumbuh (dengan pemicu sektor keuangan), namun terus berputar pada segelintir pemangku modal/uang. Sekali lagi, liberalisasi keuangan tidak diimbangi dengan kelembagaan yang mengatur bagaimana seharusnya dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

³⁸ Sekadar contoh, harga beras meningkat rata-rata 18,40% per tahun dan harga minyak goreng tanpa merk naik 22,77% per tahun (periode 2004-2008). Lihat Departemen Perdagangan, *Statistik Perdagangan*, Oktober 2008. Kenaikan itu jauh lebih tinggi dari rata-rata inflasi yang "hanya" sekitar 9,5% pada periode tersebut. Jadi, inflasi riil yang harus ditanggung orang miskin sebetulnya setara dengan inflasi bahan pangan, yakni sekitar 18%.

Grafik 5: Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi dan Inflasi yoy 2001-2009 (%)



*Data tahun 2001-2004 merupakan rata-rata pertumbuhan UMR 15 Provinsi; 2008 data 32 provinsi dan 2009 data 33 provinsi
Sumber: Kompas 2 Desember 2008; BPS, 2009

Ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan (meskipun amat pelan), tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) masih sangat besar, diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Lebih mengecewakan lagi, jumlah pekerja yang masuk ke sektor informal terus tumbuh sehingga saat ini mencapai hampir 65% dari total tenaga kerja (Tabel 10). Fenomena ini terjadi karena faktor-faktor berikut: desain insentif yang tidak bekerja di sektor pertanian, mahal biaya izin usaha, perilaku *rent-seeking* dalam promosi sektor ekonomi, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal, dan ketiadaan

Seluruh penyebab itu adalah masalah kelembagaan yang tidak disiapkan secara serius oleh pemerintah sehingga menimbulkan komplikasi masalah ekonomi, khususnya pengangguran.

perlindungan hukum terhadap sektor informal. Seluruh penyebab itu adalah masalah kelembagaan yang tidak disiapkan secara serius oleh pemerintah sehingga menimbulkan komplikasi masalah ekonomi, khususnya pengangguran.

Jadi, dilihat dari tiga kasus persoalan ekonomi yang meruap ke permukaan tersebut, terlihat aspek kelembagaan mikro yang rapuh (*weak of institutions*) menjadi sumber munculnya masalah-masalah tersebut. Ini bukan hanya khas Indonesia, tetapi negara-negara lain juga mengalaminya, seperti Algeria, Maroko, dan Tunisia (Addison dan Balamoune-Lutz, 2006:1029). Studi yang dilakukan di kawasan “Magreb” tersebut menunjukkan bahwa “kualitas kelembagaan” (*institutional quality*) memainkan peran kunci dalam menyukseskan reformasi kebijakan, khususnya reformasi sektor perdagangan dan keuangan. Sebaliknya, di negara-negara Asia Timur yang telah meningkatkan kualitas kelembagaannya, menghasilkan capaian reformasi ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan itu tidak hanya diukur dari stabilitas makroekonomi, tetapi juga dibarengi dengan mutu pembangunan ekonomi yang lebih menonjol.

Tabel 10: Tenaga Kerja Informal di Indonesia, 2008 - 2009

Tenaga Kerja Informal	Agustus 2008	Agustus 2009
Jumlah TK informal (juta)	63,82	67,86
Proporsi TK informal terhadap total TK (%)	61,3	64,7
Total TK (juta)	102,55	104,86

Sumber: ILO, 2010; dalam INDEF, 2010:94

Analisis di atas secara jelas memberikan petunjuk bahwa salah satu tugas terpenting pemerintah ke depan dalam menyelamatkan reformasi ekonomi adalah mendesain kelembagaan mikro yang lebih rinci agar masalah-masalah ekonomi yang pokok (khususnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran) dapat diatasi. Tabel 11 memberi arahan

tentang pekerjaan-pekerjaan kelembagaan yang harus diformulasikan dan dijalankan secara serius sejak sekarang. Pada level makro, kelembagaan sistem administrasi, legal, dan politik menjadi fokus yang tidak boleh dilupakan. Sementara itu, pada level mikro, kelembagaan ekonomi yang langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran mesti dirumuskan dengan detail, seperti statuta hubungan antarpelaku ekonomi, menghidupkan aset orang miskin, promosi usaha kecil dan menengah, pengendalian harga pangan, aturan upah minimum, menyederhanakan prosedur izin usaha, perlindungan pelaku sektor informal, dan lain-lain. Berikutnya, kelembagaan makro dan mikro saja belum cukup, tapi masih harus ditopang dengan kelembagaan sosial, berupa jaminan sosial dan transfer pendapatan untuk memastikan setiap individu dapat hidup secara laik.

Pada level mikro, kelembagaan ekonomi yang langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran mesti dirumuskan dengan detail, seperti statuta hubungan antarpelaku ekonomi, menghidupkan aset orang miskin, promosi usaha kecil dan menengah, pengendalian harga pangan, aturan upah minimum, menyederhanakan prosedur izin usaha, perlindungan pelaku sektor informal, dan lain-lain.

Tabel 11: Reformasi Kelembagaan yang Perlu Dibangun

Level Kelembagaan	Rincian Aturan Main	Hasil yang Diharapkan
Kelembagaan Makro		
Reformasi administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem meritokrasi - Remunerasi yang layak - Penerapan <i>reward and punishment</i> - Peningkatan kompetensi aparat birokrasi 	Sistem birokrasi dan administrasi yang mampu menjalankan kebijakan reformasi ekonomi secara efektif
Reformasi hukum/legal	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat independensi - Remunerasi yang layak - Penegakan aturan main yang konsisten - Perlindungan terhadap hak kepemilikan 	Sistem legal yang bisa diakses semua masyarakat, ada kepastian, adil, konsisten, dan cepat
Reformasi politik	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan <i>checks and balances</i> - Transparansi proses pengambilan keputusan - Sirkulasi dan pembagian kekuasaan 	Sistem politik yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rakyat, bukan berjalan karena motif-motif keuntungan pribadi (<i>rent-seeking</i>)
Kelembagaan Mikro		
Kelembagaan pengurangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Statuta hubungan antarpelaku ekonomi - Memangkas dominasi posisi pedagang lokal - Regulasi penambahan lahan - Menghidupkan aset yang mati - Penguatan koperasi serta usaha kecil dan menengah 	Pengurangan kemiskinan secara cepat dan memberi peluang berusaha permanen secara memadai/laik
Kelembagaan pengurangan ketimpangan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian harga pangan - Statuta upah minimum yang layak - Pengaturan kepemilikan aset produktif - Kuota kredit ke sektor pertanian dan IBT (luar Jawa) 	Pemerataan pendapatan, baik antarindividu, antar sektor, maupun antarwilayah
Kelembagaan pengurangan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan insentif di sektor pertanian, termasuk merombak kelembagaan distribusi - Menyederhanakan dan mengurangi biaya izin usaha - Peningkatan akses modal - Perlindungan sektor informal 	Pengurangan pengangguran, khususnya akibat penerapan kebijakan yang salah, sehingga tiap orang dapat memaksimalkan kapabilitas individu
Kelembagaan Sosial		
Jaminan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan sosial - Skema pendidikan dan kesehatan 	Menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak
Transfer pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak dan subsidi - Jaminan kesempatan kerja - Asuransi pengangguran 	Memastikan setiap orang dapat bekerja sehingga membantu percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

Bapak rektor dan hadirin yang saya muliakan,

Catatan Penutup

Krisis ekonomi 1997/1998 harus diakui merupakan titik pijak penting yang mengubah watak perekonomian nasional secara cukup drastis. Sebelum masa krisis ekonomi tersebut, karakteristik ekonomi Indonesia digambarkan dengan peran negara yang eksekutif dalam perekonomian, struktur usaha yang terkonsentrasi (monopoli/oligopoli), sentralisasi manajemen ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter yang kurang kredibel, dan patronase politik-bisnis yang tidak sehat. Meskipun krisis ekonomi 1997/1998 tidak berangkat dari masalah-masalah tersebut, tetapi disadari karakteristik ekonomi itu membuat krisis ekonomi menjadi lebih dalam dan sulit diatasi. Pada akhirnya, krisis ekonomi pada saat itu merembet menjadi krisis politik (kepemimpinan) sebagai cikal bakal terjadinya reformasi ekonomi dan politik. Di sini, reformasi politik menjadi pintu pembuka terjadinya reformasi ekonomi secara lebih intensif.

Reformasi ekonomi yang dipilih Indonesia agak berbeda dengan jalan reformasi ekonomi di negara-negara Asia lainnya. Indonesia memulai reformasi ekonomi pada level makro, mendahului reformasi ekonomi pada tingkat mikro. Secara umum, Indonesia tergolong negara yang telah mengambil pilihan melakukan reformasi ekonomi secara besar-besaran, di antaranya ditandai dengan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, desentralisasi ekonomi, menjalankan sistem ekonomi pasar (termasuk proyek privatisasi BUMN), disiplin fiskal (menjaga defisit fiskal) dan moneter (termasuk independensi bank sentral), dan pengenalan regulasi persaingan usaha yang sehat. Buah reformasi ekonomi itu perlu diakui sebagian telah menghasilkan kinerja ekonomi yang bagus, khususnya dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Sungguh pun begitu, di luar stabilitas

Indonesia memulai reformasi ekonomi pada level makro, mendahului reformasi ekonomi pada tingkat mikro.

makroekonomi, reformasi ekonomi justru menciptakan ragam masalah yang mencemaskan bagi masa depan ekonomi nasional, misalnya ketimpangan pendapatan yang meningkat, kemiskinan yang stagnan, dan penurunan pengangguran yang lambat.

Penyebab pemburukan sebagian penampilan ekonomi tersebut bukan saja dapat dilihat dari pilihan kebijakan reformasi ekonomi, tetapi juga kelemahan dalam mendesain kelembagaan yang bermutu. Dalam bingkai besar, kelembagaan yang tidak berkualitas itu terpantul dari kegagalan pemerintah menciptakan “*institutional environment*” berupa reformasi kelembagaan administrasi, sistem legal (hukum), dan sistem politik (demokrasi). Ketiganya merupakan “syarat perlu” agar kebijakan reformasi ekonomi dapat dikerjakan di lapangan. Berikutnya, kelembagaan makro (*institutional environment*) saja tidak cukup (*necessary but not sufficient*), karena masih dibutuhkan lagi kelembagaan mikro (*institutional arrangements*) untuk memperkuat kebijakan reformasi ekonomi. Kelembagaan pada level mikro dalam kasus ketimpangan pendapatan antara lain adalah rincian regulasi upah minimum, kebijakan harga pangan, dan

Last but not least, kelembagaan sosial harus dihadirkan untuk memastikan bahwa dalam proses reformasi tersebut tidak ada kelompok masyarakat yang tergilas roda perubahan ekonomi, yaitu dengan instrumen jaminan sosial dan transfer pendapatan.

sektor ekonomi, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal, dan ketiadaan perlindungan hukum terhadap sektor informal. Sayangnya,

pemanfaatan sumber daya di sektor keuangan. Berikutnya, kelembagaan yang terkait masalah kemiskinan adalah aturan main tentang statuta hubungan antarpelaku ekonomi, menghidupkan aset ekonomi yang mati, dan perdagangan internasional yang selektif. Terakhir, dalam soal pengangguran, kelembagaan yang mesti disiapkan adalah desain insentif yang tidak bekerja di sektor pertanian, mahalnya biaya izin usaha, perilaku *rent-seeking* dalam promosi

kelembagaan mikro ini absen dalam implementasi kebijakan reformasi ekonomi di Indonesia. *Last but not least*, kelembagaan sosial harus dihadirkan untuk memastikan bahwa dalam proses reformasi tersebut tidak ada kelompok masyarakat yang tergilas roda perubahan ekonomi, yaitu dengan instrumen jaminan sosial dan transfer pendapatan.

Akhirnya, terdapat mata rantai lain yang tidak boleh dinalpakan, yakni reformasi ekonomi tidak dilakukan di ruang kedap politik, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsep reformasi ekonomi tidak boleh steril dari napas hidup sebuah negara. Demikian pula, menjalankan kebijakan reformasi ekonomi akan menemui jalan terjal bila tanpa mengadopsi keseluruhan karakteristik sosio-budaya di negara yang bersangkutan. Pada titik ini, penting untuk mendesain kebijakan reformasi ekonomi yang otentik sesuai karakteristik dan kebutuhan ekonomi nasional. Sehingga, kebijakan reformasi ekonomi harus disusun oleh bangsa sendiri, bukan diformulasikan oleh pihak lain yang menyimpang dari karakter dan kebutuhan ekonomi Indonesia. Tentu saja, panduan yang paling lurus agar kebijakan reformasi ekonomi tidak tersesat di jalan yang keliru adalah konstitusi (UUD 1945). Saat ini pekerjaan rumah yang penting bagi bangsa ini, selain meluruskan agenda reformasi ekonomi, adalah memproduksi Undang-undang Sistem Ekonomi Nasional yang diturunkan dari konstitusi. Seterusnya, kebijakan dan kelembagaan reformasi ekonomi yang didesain tidak boleh menabrak spirit UU tersebut. *Wallahu'alam bissawab*.

Bapak rektor dan hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup pidato ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang telah berjasa menjadikan saya seperti saat ini, izinkan saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berperan penting dalam proses yang memungkinkan saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Universitas Brawijaya ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan

penghargaan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Mohammad Nuh dan Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito yang telah menyetujui pengusulan dan pengangkatan saya menjadi Guru Besar. Di samping itu juga kepada para Rektor terdahulu, khususnya Prof. Drs. Zaenal Arifin Achmady, MPA., Prof. Drs. Hasyim Baisoeni, Prof. Dr. Eka Afnan Troena, SE., dan Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menapak karir hingga ke jenjang Guru Besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Senat Guru Besar dan Badan Pertimbangan Senat (BPS) Universitas Brawijaya dan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang telah menyetujui pengusulan dan pengangkatan saya menjadi Guru Besar.

Kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Bapak Gugus Irianto, SE, MSA, Ak, Ph.D., dan Dekan FE UB sebelumnya, khususnya Prof. Dra. H.O.S. Hastoeti Harsono, Prof. Dr. Muhammad Saleh, Drs. Abidin Lating, MS., Prof. Dr. Drs. Umar Burhan, MS., Prof. Dr. Harry Susanto, SE, SU., dan Prof. Dr. Bambang Soebroto, SE, Ak., M.M., saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan, bimbingan, dan dorongannya selama saya menjadi dosen di FE UB. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Dekan FE UB, Bapak Gugus Irianto, SE, MSA, Ak, Ph.D, yang telah membimbing saya saat menjadi Pembantu Dekan I FE UB dalam periode yang singkat (Agustus 2009-April 2010). Terima kasih juga kepada Pembantu Dekan II Bapak Didit Affandi, SE, MBA, Ak., dan Pembantu Dekan III Bapak Nanang Suryadi, SE, MSi, yang telah menjadi mitra menyenangkan dalam mengembangkan FE UB. Tentu saja, kegiatan akademik di bawah koordinasi PD I tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari para Ketua Jurusan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ghozali Maski, SE, MS (Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi), Dr. Fatchur Rohman, SE, MM (Ketua Jurusan Manajemen), dan Dr. Unti Ludigdo, SE, Ak., MSi (Ketua Jurusan Akuntansi), yang telah bersama-sama membangun komitmen dalam meningkatkan kualitas akademik yang berstandar tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada para pengelola dan staf administrasi di

lingkungan pascasarjana FE UB. Terima kasih pula kepada Dias Satria, SE, MAppEC., yang telah banyak membantu tugas-tugas saya selama menjadi PDI.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bagian Personalia Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Personalia Universitas Brawijaya yang dengan ikhlas telah membantu memproses pengusulan jabatan Guru Besar dari Tingkat Fakultas, Universitas, hingga Kementerian Pendidikan Nasional. Terima kasih juga ingin saya layangkan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan acara pengukuhan pada hari ini.

Secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para senior dan guru saya di lingkungan FE UB yang telah mengantarkan, membina, dan mendukung pengembangan karir saya menjadi dosen dan peneliti di FE UB. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Munawar Ismail, SE, DEA dan Prof. Dr. Agus Suman, SE, DEA., yang tanpa mereka sadari telah menjadi guru saya untuk memahami ilmu ekonomi secara lebih baik sejak saya masih mahasiswa. Kepada Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE, MSc. dan Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS saya mengucapkan terima kasih atas kemitraan dalam kegiatan penelitian, khususnya sesuai saya pulang studi doctoral. Berikutnya, saya berhutang budi kepada Prof. Dr. Harry Susanto, SE, SU., yang selalu mendukung pada saat saya menempuh studi doctoral (ketika itu beliau menjadi Dekan FE UB), serta selalu memberi penguatan atas minat bidang ilmu yang saya tekuni sesuai saya menyelesaikan studi doctoral. Saya mendoakan semoga beliau lekas diberi kesembuhan dan dapat bergabung kembali di Jurusan Ilmu Ekonomi FE UB. Amin.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua guru dan dosen yang telah mendidik saya dari mulai TK sampai Universitas. Berkat jasa merekalah hari ini saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar saya di hadapan para hadirin yang saya muliakan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Winfried Manig, Prof. Dr. Hans Meliczek, dan Prof. Dr. Beatrice Knerr yang telah menuntun saya menjadi seorang akademisi yang benar. Mereka bukan hanya menjadi pembimbing dan penguji disertasi, tapi juga mitra yang sabar dalam mengasah kemampuan

intelektual saya, terutama untuk menulis karya ilmiah.

Kepada semua kolega di Fakultas Ekonomi, khususnya di Jurusan Ilmu Ekonomi FE UB, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga, terlebih dalam memberi ruang kepada saya untuk mengembangkan ilmu, membangun etos kerja, dan menumbuhkan solidaritas. Mereka adalah teman-teman diskusi yang gigih, rekan kerja yang cekatan, dan kawan berjuang yang tidak kenal pamrih. Saya betul-betul merasa beruntung dapat bekerja di tengah lingkungan yang amat menyenangkan tersebut.

Saya juga hendak memberikan penghargaan kepada seluruh mahasiswa, baik program sarjana maupun pascasarjana, yang selama kegiatan perkuliahan maupun pembimbingan (skripsi, tesis, dan disertasi) telah menyumbangkan inspirasi kepada saya. Dari para mahasiswa tersebut, saya memperoleh banyak ilmu, sesuatu yang mungkin tidak mereka sadari. Lebih kurang, dalam proses interaksi itu sebetulnya telah terjadi barter ilmu pengetahuan di antara kita. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas donasi inspirasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Juga tidak saya lupakan ucapan terima kasih kepada para kolega di ECORIST (*The Economic Reform Institute*) yang sejak 2005 mencoba berjuang menghidupkan lembaga kajian di Malang, sambil pada saat yang bersamaan memberi ruang alternatif kepada para mahasiswa (ataupun yang baru lulus) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Selain bergumul dengan rekan-rekan kerja di Fakultas Ekonomi UB, saya juga bersyukur mendapatkan kesempatan bernaung di beberapa lembaga yang berperan penting dalam pematangan kemampuan akademik maupun non-akademik. *Pertama*, saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kajian INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), khususnya kepada Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Dr. Fadhil Hasan, Dr (Cand.) Aviliani, Prof. Dr. Bustanul Arifin dan Dr. Drajad Wibowo yang memberi ruang kepada saya mengenal kerja-kerja akademik secara lebih intens dan mengampanyekan hasil karya akademik tersebut ke para perumus kebijakan. Saya mengucapkan pula terima kasih kepada para staf peneliti dan administrasi INDEF yang

selama ini telah mendukung saya dalam memimpin lembaga kajian ini. *Kedua*, Tim Visi 2033, khususnya Dr. (Cand.) Andrinof Chaniago, SIP, MSi., Dr. Jehansyah Siregar, Tata Mustafa, SE, MA., dan Ian Suherlan, S.HI, MSi yang tiada lelah mencoba menafkahkan pikiran dan energinya untuk memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas persahabatannya yang tulus selama ini.

Ketiga, sejak Maret 2010 saya harus membagi pikiran dan waktu dengan rekan-rekan kerja di BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), yang sebagian besar diisi dengan kerja intelektual dan mengembangkan kesepahaman antarlembaga negara demi membangun bank sentral yang lebih kredibel. Saya berterima kasih kepada Bapak Umar Juoro, MA., MAPE (sebagai Ketua BSBI) dan para anggota BSBI, Bapak Prof. Dr. Akhmad Syahroza, Dr. Marsuki, SE, DEA dan Rama Pratama, SE, MSi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf analisis BSBI (Achmad Nur Hidayat, ST, MPP, Dhani Irawan, SE, Ak., Gufron Albayroni, SE, Ak., Handoyo Prihatanto, SH, MH, dan Abdul Manap Pulungan, SE), kepala sekretariat (Heru Saptaji, SH, MBA), dan perangkat administrasi BSBI yang selama ini sangat mendukung pekerjaan saya di BSBI. Dalam menjalankan tugas di BSBI ini pula saya berinteraksi dengan dua institusi penting, yakni DPR RI (khususnya Komisi XI) dan Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dan mitra kerja di Bank Indonesia, khususnya Gubernur, Deputy Gubernur, Direktur BI, para staf BI, serta Pimpinan Kantor Perwakilan dan Kantor BI (baik di daerah maupun di luar negeri, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu) atas kerjasamanya selama ini.

Bapak rektor dan hadirin yang saya hormati,

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, kepada kedua orang tua Bapak M. Sofwan Chudhorie dan Ibu Sri Ismiyanti yang telah menanamkan saripati hidup dengan cara yang amat bersahaja, saya bersimpuh sebagai wujud terima kasih yang tak bertepi. Ucapan terima kasih ini pasti tidak akan

pernah bisa menebus cinta dan kasih sayang mereka kepada saya. Bapak dan Ibu secara terus-menerus mendoakan, merawat, menuntun, dan menunjukkan arah ke mana saya mesti berjalan. Tanpa seluruh “intervensi” tersebut mustahil sekarang saya bisa berdiri di sini. Selebihnya, saya hanya mampu mendoakan semoga kedua orang tua saya diberi umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, dan nikmat kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Tentu saja, saya juga mohon doanya agar tetap diberi sikap rendah hati, laku yang lurus, dan komitmen sosial yang terjaga. Juga terima kasih kepada Bapak/Ibu mertua, Bapak Abdullah Baksh (almarhum) dan Ibu Hadjidjah Ponulele, yang selama ini tanpa disadari turut memberi lingkungan yang nyaman bagi saya untuk menggapai cita-cita. Mereka selalu mendukung dan mendoakan semua langkah yang saya ayunkan selama ini. Kepada Bapak mertua, semoga Allah SWT menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kepada Ibu mertua, semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat kesehatan, rizki, dan kebahagiaan. Amin

Terima kasih kepada kedua adikku tercinta, Ronny (dan keluarga kecilnya: Lina, Ocha, Thoriq, dan Firza) dan Denny, dua adik yang selalu memahami kekurangan dan keterbatasan kakaknya sehingga terbiasa menawarkan pertolongan pada saat benar-benar dibutuhkan. Semoga Allah SWT membalas seluruh budi baik itu dengan kebahagiaan dan seluruh cita-cita kalian dapat tercapai. Juga kepada kakak ipar tersayang, Toar Magaribi dan Eka Rifka (dan putra-putranya: Rizki, Bintang, Ananta, dan Ara), saya mengucapkan terima kasih atas suasana ceria yang selalu diciptakan setiap kali kita bertemu. *Last but not least*, saya menyampaikan penghargaan kepada istri tercinta, Rukavina Baksh, yang telah memberikan seluruh komitmennya kepada saya (tanpa *reserve*) untuk menggumuli dunia gagasan. Terlebih, saya menyampaikan terima kasih atas keikhlasannya mengambil alih seluruh urusan keluarga yang tak mampu saya lakukan atas nama pekerjaan. Selanjutnya, sulit mengekspresikan perasaan yang satu ini, tetapi kehadiran Amartya Iqra Akhlaqi (Tya) dan Nayaka Iqra Aufklara (Naya) telah membuat hidup saya menjadi lebih utuh. Mereka adalah alasan terbesar munculnya

inspirasi saya yang tidak pernah putus. Kejenakaan dan keceriaan mereka mampu mendonorkan energi yang tidak pernah ada ujungnya. Mudah-mudahan dalam kegelapan atau keremangan pemahaman mereka tentang apa yang terjadi hari ini, kalian dapat merasakan betapa besarnya rasa syukur dan terima kasih Ayah pada kalian berdua.

Sebagai penutup, saya memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahi kesejatian hidup dan kepada semua pihak yang telah saya sebutkan di atas (serta seluruh pihak lain yang telah membantu perjalanan hidup dan karir saya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu), semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Kepada hadirin yang telah meringankan langkah hadir di forum yang berbahagia ini, saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Addison, T. and Mina B.L. 2006. Economic Reform When Institutional Quality is Weak: The Case of the Maghreb. *Journal of Policy Modeling*. Vol. 28: 1029-1043
- Ahrens, J. 2000. Toward a Post-Washington Consensus: The Importance of Governance Structures in Less Developed Countries and Economies in Transition. *Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition*. Vol. 4: 78-96
- Bank Indonesia. 2009. *Outlook Ekonomi Indonesia 2009 - 2014: Krisis Finansial Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta
- , 2010. *Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional: Laporan Perekonomian Indonesia 2009*. Jakarta
- , 2010. *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia: Triwulan II - 2010*. Bank Indonesia. Jakarta
- Bardhan, P. 1996. *The Nature of Institutional Impediments to Economic Development*. Institute of Business and Economics. Center for International and Development Economics Research. University of California. Berkeley. USA. Internet website: <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=iber/cider> (Diakses pada 25 Desember 2002)
- Basri, M.C. and Hal H. 2002. The Political Economy of Manufacturing Protection in Indonesia. Dalam Mohamad Ikhsan *et. al. 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Penerbit Kompas. Jakarta
- Caporaso, J.A. and David P.L. 1993. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press. England
- Charoenseang, J. and Pornkamol M. 2002. Financial Crisis and Restructuring in Thailand. *Journal of Asian Economics*. Vol. 13: 597-613
- Chowdhury, A. 1999. Political Economy of Macroeconomic Management: The Need for Institutional Change. *International Journal of Social Economics*. Vol. 26, No. 1/2/3: 389-401
- Colombatto, E. and Jonathan R.M. 1997. *Lessons from Transition in Eastern Europe: A Property-Right Interpretation*. International Bulletin. Vol. 1, No. 1: 23-29

- Dasgupta, B. 1998. *Structural Adjustment, Global Trade, and the New Political Economy of Development*. Zed Books. New York
- Departemen Perdagangan. 2008. *Statistik Perdagangan*. Oktober
- Diehl, M. 1998. The Role of Institutions in the Economic Transition Process: The Reform of State-owned Enterprises in Vietnam. *Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition*. Vol. 2: 49-58
- Fan, J.P.H., Randall M., Lixin Colin X., and Bernard Y. 2009. Institutions and Foreign Direct Investment: China versus the Rest of the World. *World Development*. Vol. 37, No. 4: 852-865
- Fritzen, S. 2002. Growth, Inequality and the Future Poverty Reduction in Vietnam. *Journal of Asian Economics*, Vol. 13: 635-657
- Gagliardi, F. 2008. Institutions and Economic Change: A Critical Survey of the New Institutional Approaches and Empirical Evidence. *The Journal of Socio-economics*. Vol. 37: 416-443
- Ghai, D. 1997. Social Development and Public Policy: Some Lessons from Successful Experiences. UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development). *Discussion Paper*. No. 89
- Haggard, S. and Robert R.K. 1995. *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton University Press. New Jersey.
- Harian Ekonomi Neraca. 2010. *Pemda Harus Kendalikan Pertumbuhan Ritel Modern*. 3 September
- Harney, A. 2009. *The China Price: The True of Chinese Competitive Advantage*. The Penguin Press. USA
- Hayami, Y. 2003. From Washington Consensus to the Post-Washington Consensus: Retrospect and Prospect. *Asian Development Review*. Vol. 20, No. 2: 40-65
- Hill, H. 1999. An Overview of the Issues. Dalam H.W. Arndt dan Hal Hill. *Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward*. St. Martin's Press. New York
- Howell, J. 1993. *China Opens Its Doors: The Politics of Economic Transition*. Lynne Rienner Publishers. USA
- Hu, V. 2005. *The Chinese Economic Reform and Chinese Entrepreneurship*. *Jornadaeconomia*. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan023535.pdf> (diakses pada 29 Agustus 2010)

- Indrawati, S.M. 2002. Indonesia Economic Recovery Process and the Role of Government, *Journal of Asian Economics*, Vol. 13: 577-596
- Jang, H. and Wonsik S. 2002. The Asian Financial Crisis and the Co-movement of Asian Stock Markets. *Journal of Asian Economics*, Vol. 13: 94-104
- Kherallah, M. and Johann K. 2001. *The New Institutional Economics: Application for Agricultural Policy Research in Developing Countries*. MSSD Discussion Paper. No. 41, June. IFPRI. Washington DC
- Kloby, J. 1997. *Inequality, Power, and Development: The Task of Political Sociology*. Humanities Press. New Jersey
- Krugman, P. 2009. *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. W.W. Norton & Company. New York
- Kuncoro, A. and Budi S.R. 2006. The Political Economy of Indonesia Economic Reforms 1983-2000. Oxford Development Studies. *Taylor and Francis Journal*. Vol. 34, No. 3: 341-355
- Kuncoro, M. dan Anggito A. 1995. *Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Liberalisasi: Sebuah Catatan Empiris*. FE UGM. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan
- McCawley, P. 2002. Economic Policy During the Soeharto Era: A Balance Sheet. Dalam Mohamad Ikhsan *et. al. 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Kompas. Jakarta
- McCleery, R.K. and Fernando D.P. 2008. The Washington Consensus: A Post-Mortem. *Journal of Asian Economics*. Vol. 19: 438-446
- Media Indonesia. 2010. *Pembajakan di Indonesia Tertinggi di Asia*. 25 Agustus
- Modjo, M.I. 2010. *Proyeksi Ekonomi 2010*. Makalah dipresentasikan pada seminar Indef Economic Outlook 2010. Jakarta. 25 Januari. Tidak dipublikasikan
- Munday, S.C.R. 1996. *Current Developments in Economics*. MacMillan Press Ltd. London
- Murrell, P. 1992. Evolutionary and Radical Approaches to Economic Reform. *Economics of Planning*. Vol. 25: 79-95
- Murrell, P. 2005. Institutions and Firms in Transition Economies. Dalam Claude Menard dan Mary M. Shirley (eds.). *Handbook of New Institutional Economics*. Springer. The Netherlands
- Nasution, A. 2002. The Indonesian Economic Recovery from the Crisis in 1997-1998. *Journal of Asian Economics*. Vol. 13: 157-180

- Nazara, S. 2010. *Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI. 10 Maret. Tidak dipublikasikan
- Nelson, R.R. 2008. What Enables Rapid Economic Progress: What are the Needed Institutions?. *Research Policy*. Vol. 37: 1-11
- North, D.C. 1994. Economic Performance Through Time. *The American Economic Review*. Vol. 84, Issue 3, June: 359-368
- Panagariya, A. 2002. *India's Economic Reforms: What Has Been Accomplished? What Remains to Be Done?* ERD Policy Brief No. 2
- Pejovich, S. 1995. *Economic Analysis of Institutions and Systems*. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. The Netherlands
- Prahalad, C.K. 2006. *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*. Pearson Education, Inc. USA
- Rodrik, D. and Arvind S. 2003. The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean). *Finance and Development*. Vol. 40, No. 2, June: 31-34
- Rodrik, D. 1996. Understanding Economic Policy Reform. *Journal of Economic Literature*. Vol. 3. Issue 1: 9-41
- Roubini, N. and Stephen M. 2010. *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*. The Penguin Press. New York
- Rutherford, M. 1994. *Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism*. Cambridge University Press. Cambridge
- Sadewa, P.Y. 2010. *Mencari Hal Positif dari Arah Ekonomi*. Kompas. 12 Juli
- Savoia, A., Joshy E., and Andrew M. 2010. Inequality, Democracy, and Institution: A Critical Review of Recent Research. *World Development*. Vol. 38, No. 2: 142-154
- Schwab, K. (ed.). 2009. *The Global Competitiveness Report 2009-2010*. World Economic Forum. Geneva. Switzerland
- 2010. *The Global Competitiveness Report 2010-2011*. World Economic Forum Geneva. Switzerland
- Seers, D. 1969. *The Meaning of Development*. Paper Presented at the Eleventh World Conference of the Society for International Development. New Delhi. 4-17 November
- Sen, A. 1999. *Development as a Freedom*. Anchor Books. New York

- Shafaeddin, S.M. 2005. *Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural Change or De-Industrialization?*. Discussion Papers. United Nations Conference on Trade and Development. No. 179. April
- Shah, M. 2002. *An Overview of the Administrative Reform in the Malaysian Public*. Internet Website service. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003924.pdf> (diakses pada 21 Oktober 2010)
- Simanjuntak, R.A. 2002. Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Dalam Mohamad Ikhsan *et. al. 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Kompas. Jakarta
- Steer, L. and Kunal S. 2010. Formal and Informal Institutions in a Transition Economy: The Case of Vietnam. *World Development*. Vol. xx, No. x: 1-13
- Stiglitz, J. 2002. *Globalization and Its Discontents*. Penguin Books. England
- , 2004. *The Roaring Nineties: Why We're Paying the Price for the Greediest Decade in History*. Penguin Books. 2004
- , 2010. *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. W.W. Norton & Company. New York
- Stone, A. 2008. Institutional Reform: A Decision-making Process View. *Research in Transportation Economics*. Vol. 22: 164-178
- Tian, G. 2001. A Theory of Ownership Arrangements and Smooth Transition to a Free Market Economy. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 157, No. 3, September: 380-412
- World Bank. 1993. *East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy*. World Bank Publication. September
- World Bank. 2009. *Doing Business 2009*. <http://www.doingbusiness.org/> (diakses pada 3 September 2010)
- Yeager, T.J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. Political Economy of Global Interdependence. Oxford
- Yustika, A.E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia. Malang
- , 2010. *Kemiskinan dan Dualisme Ekonomi*. Jawa Pos. 13 Juli
- Yustika, A.E. *et. al.* 2010. *Kerentanan Mikroekonomi di Balik Stabilitas Makroekonomi*. INDEF. Jakarta

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Ahmad Erani Yustika
Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I/III d
NIP	: 19730322 199702 1 001
Jabatan Akademik	: Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Fakultas	: Ekonomi
Tanggal lahir	: 22 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama Istri	: Rukavina Baksh
Nama Anak	: Amartya Iqra Akhlaqi Nayaka Iqra Aufklara
Alamat Kantor	: Jl. M.T. Haryono 165, Malang, 65145 Telp.: +62-341-551396
Alamat Rumah	: Perum. Permata Jingga BB 57, Malang, 65142 Telp.: +62-341-7089220, 08123300355
Alamat Email	: erani@fe.ub.ac.id; erani73@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1985	MI Syuhada' Ngunut, Babadan, Ponorogo
1988	SMP Ma'arif I Ponorogo
1991	SMAN I Ponorogo
1996	Sarjana (SE) - Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
2001	Master (MSc) Institute fuer Rurale Entwicklung - Universitaet Göttingen, Jerman
2005	Doktor (Ph.D) Institute fuer Rurale Entwicklung - Universitaet Göttingen, Jerman

Riwayat Jabatan Akademik

1. Asisten Ahli Madya, Penata Muda/CPNS, Golongan IIIa, TMT 1 Februari 1997 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.4117/A2/KP/1997
2. Asisten Ahli Madya, Penata Muda/PNS, Golongan IIIa, TMT 1 Februari 1998 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.4953/PT.13.H15/C3/1997
3. Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, Golongan IIIb, TMT 1 April 2002 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.4881/J10.11/KP/2002
4. Lektor, Penata, Golongan IIIc, TMT 1 April 2004 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.1847/J.10/KP/2004
5. Lektor Kepala, Penata Tk. I, Golongan IIId, TMT 1 April 2007 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.34710/AA5/KP/2007
6. Guru Besar, Penata Tk. I, Golongan IIId, TMT 1 Juni 2010 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No.59742/A4.5/KP/2010

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan

1. Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi - Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
2. Sekretaris Eksekutif P3BE (Pusat Pengkajian Pembangunan, Bisnis, dan Etika), 1997 - 2002
3. Ketua Biro Publikasi PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Göttingen – Jerman, 2000-2001
4. Ketua Biro Kajian Ilmiah PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Göttingen – Jerman, 2004-2005
5. Ketua Pusat Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah (PDPI) dan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2005 – 2007
6. Direktur Eksekutif ECORIST (*The Economic Reform Institute*), 2005 – 2008
7. Direktur PHK A3 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006 - 2008
8. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007 - 2009

9. Direktur Eksekutif INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), 2008 - sekarang
10. Pembantu Dekan I (Akademik), Fakultas Ekonomi – Universitas of Brawijaya, 2009 (Agustus) – 2010 (April)
11. Ketua Departemen Fiskal dan Anggota (merangkap sekretaris) Staf Ahli KADIN Jawa Timur, 2009 – sekarang
12. Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), 2010 - sekarang

Tanda Penghargaan

1. Penghargaan sebagai penerima beasiswa GTZ dari pemerintah Jerman pada 1999 – 2001 (studi master)
2. Penghargaan sebagai penerima beasiswa DAAD dari pemerintah Jerman pada 2002 – 2005 (studi doctoral)
3. Penghargaan sebagai dosen berprestasi I Universitas Brawijaya pada 2006
4. Penghargaan sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya pada 2007
5. Penghargaan sebagai dosen berprestasi I Universitas Brawijaya dan dosen berprestasi tingkat nasional pada 2009
6. Best Paper Award 2009 - *Journal of Indonesian Economic and Business*, FE-UGM
7. Satyalencana Karya Satya, 2010

Keanggotan Profesi

1. Anggota ISNIE (*International Society for New Institutional Economics*)
2. Anggota dan Pengurus ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)
3. Anggota IRSA (*Indonesian Regional Science Association*)
4. Deklarator dan anggota AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia)

Pengalaman Bidang Penelitian

1. Analisis Ekonomi Politik Sektor Informal di Wilayah Kotamadya Malang: Studi Terhadap Kebijakan Sektor Informal Perkotaan, FE Unibraw, 1996
2. Sistem Pemasaran Produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia, BPPT, 1997

3. Profil Industri Kecil di Wilayah Kotamadya Malang, FE Unibraw, 1998
4. Analisis Sektor Informal di Wilayah Kotamadya Malang: Studi Model Pembinaan dan Alokasi Ruang, FE Unibraw, 1998
5. Model Pengawasan dan Pembinaan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, 1998
6. Analisis Sosial Ekonomi Industri Kecil di Kodya Malang, FE Unibraw, 1999
7. Studi Eksplorasi BPRS di Jawa Timur, Bank Indonesia, 1999
8. Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Malang, FE Unibraw, 2001
9. Ekonomi Biaya Transaksi Industri Gula di Jawa Timur, FE Unibraw, 2003/2004
10. Evaluasi dan Pemantauan Dana Kompensasi BBM, Menko Kesra, 2005
11. *Key-Action* Revitalisasi Sektor Pertanian di Jawa Timur, Bappeda Jatim, 2005
12. Desain Program Pengembangan Komoditas Agro di Jawa Timur, Bappeda Jatim, 2005
13. Desain Program Pengembangan Perdagangan Antar-provinsi Jawa Timur, Bappeda Jatim, 2005
14. Model Implementasi Revitalisasi Pertanian di Beberapa Kabupaten di Jawa Timur, Bappeda Jatim, 2006
15. Implikasi Dinamika Perubahan Pasar terhadap Fenomena Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Bappeda Jatim, 2006
16. Perubahan Kelembagaan Kepemilikan Lahan, Hubungan Kerja, dan Perkreditan di Sektor Pertanian: Studi Kasus di Kabupaten Malang, FE Unibraw, 2006
17. Kontribusi Sektoral PDRB di Kabupaten Sumenep dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi, Bappeda Sumenep, 2007
18. Kajian Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Sumenep, Bappeda Sumenep, 2007
19. Ekonomi Politik Kebijakan Antidumping Industri Pulp dan Paper: Studi Kasus Perdagangan Internasional antara Indonesia dan AS, Indef, 2007
20. Dampak Ekonomi Keputusan KPPU Mengenai Kepemilikan Silang PT Temasek terhadap PT Telkomsel dan PT Indosat, Indef, 2007

21. Ketahanan Pangan dan Perubahan Kelembagaan: Studi Perubahan Kelembagaan Terhadap Kepemilikan Lahan, Hubungan Kerja, dan Akses Kredit di Pedesaan, Kementerian Ristek, 2008
22. *Making Rural Livelihoods Work for the Poor: Case Study of Oil Palm, Rice, and Shrimp Production*, Oxfam GB, 2008
23. RUPM dan *Roadmap* Investasi, BKPM dan Indef, 2008
24. Kajian Pemetaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sumbawa Barat, Indef, 2008
25. Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga Produk Pangan, Batch I, LIPI, 2009
26. Hak Kepemilikan dan Ketahanan Pangan: Studi Implikasi Pengelolaan Irigasi Terhadap Akses Air dan Pendapatan Petani, Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2009
27. Desain Sistem Persaingan Usaha di Indonesia, KPPU dan FE UB, 2009
28. *Policy Note on Public Financial Management of the Agriculture Budget*, Bank Dunia, 2010
29. Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga Produk Pangan, Batch II, LIPI, 2010
30. Pengkajian tentang Beban-beban Administrasi Terkait Kegiatan Penanaman Modal yang Ditanggung oleh Perusahaan, Indef dan BKPM, 2010

Pengalaman Instruktur/Konsultan

1. Pelatihan Ekonomi dan Manajemen (TEKOMAN) Partai Keadilan, diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan (PIPPK) Region 3 di Negara Jerman, 2003
2. Pelatihan menulis dengan topik "Ide, Opini, Kritik", diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya, 2004
3. Lokakarya Peninjauan Kurikulum Berbasis Kompetensi, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2005
4. Pelatihan Strategi Pembentukan Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Globalisasi, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum - Universitas Brawijaya dan Pemda Sumenep, 2005

5. Pelatihan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Kebijakan Publik (PSE KP) – Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan *Georgia State University* (GSU) dan *The World Bank*, 2005
6. *Workshop* Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya, 2005
7. *Workshop* Ekonomi Kelembagaan Berbasis Masyarakat: Kasus Program Pengembangan Kecamatan, diselenggarakan oleh Program Pengembangan Kecamatan Konsultan Manajemen Nasional (Regional Management Unit - VII), Bank Dunia, Surabaya, 2005
8. Pelatihan Penanganan Program dan Proyek: Perspektif Ekonomi Kelembagaan, diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Batu, 2006
9. Pelatihan Penulisan Buku Teks dan Referensi, diselenggarakan oleh UPT Universitas Jember, 2006
10. Pelatihan Politik Anggaran dan Korupsi, diselenggarakan oleh Malang Corruption Watch, Batu, 2006
11. Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya, 2006
12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Pemberdayaan, diselenggarakan oleh Pemprov Jatim – Badan Koordinasi Wilayah III Malang, Malang, 2007
13. Pelatihan Buruh Mengenai Sistem Kapitalisme dan Sosialisme, diselenggarakan oleh Serikat Buruh Surabaya, Malang, 2007
14. Pelatihan Desentralisasi, Pembangunan Ekonomi Lokal, dan Kesejahteraan Masyarakat, diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2007
15. Pelatihan Perencanaan Partisipatif dan Analisis *Stakeholders*, diselenggarakan oleh Bappeprov Jatim, Surabaya, 2008
16. Pelatihan Desain APBD dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, diselenggarakan dalam rangka acara Pelatihan dan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bali, 2008
17. *Legislative Budget Office, Workshop* yang diselenggarakan oleh *Asia Foundation*, Jakarta, 10 Desember 2008

18. Pelatihan tentang Industrialisasi, Sektor Informal, dan Ketahanan Pangan, diselenggarakan oleh Lead Indonesia, Jakarta, 2009
19. Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis SKPD, Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Pasuruan, Malang, 2009
20. *Workshop* Masalah dan Prospek UMKM di Jawa Timur, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag Kota Pasuruan, 2009
21. *Workshop* Anggaran dan Pengawasan Keuangan DPD, diselenggarakan oleh UNDP, Jakarta, 2009
22. *Workshop* Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengembangan UMKM, diselenggarakan oleh Bappeda Jawa Timur, Sidoarjo, 2010
23. *Workshop* Urgensi UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Lokal, diselenggarakan oleh Dinas Kopindag dan UKM Pasuruan, Malang, 2010
24. *Workshop* Perbankan, Persaingan Usaha, dan Tata Kelola, diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN), Jakarta, 2010

Karya Ilmiah

Jurnal

1. Ahmad Erani Yustika, 2001, The Role of Government in Economic Development: The Case Study in Indonesia, *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Vol. XVIII, No. 2
2. Ahmad Erani Yustika, 2002, Comparative Analysis of Small Farm Household in Periurban and Rural Areas in Malang District – Indonesia, *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX, No. 2
3. Ahmad Erani Yustika, 2002, Melacak Akar Krisis dari Sudut Lain, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 2, No. 2, Juni – September
4. Ahmad Erani Yustika, 2002, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Humanika*, Vol. 6, No. 2, Desember
5. Ahmad Erani Yustika, 2003, Rural Poverty in Indonesia: A New Institutional Economics Perspective, *Jurnal Humanika*, Vol. 7, No. 1, Juli
6. Ahmad Erani Yustika, 2003, Sirkulasi Pembangunan dan Konfigurasi Krisis Ekonomi Dunia Ketiga, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XX, No. 2, Juli
7. Ahmad Erani Yustika, 2004, Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 1, Maret

8. Ahmad Erani Yustika, 2004, *Patologi Otonomi Daerah: Duplikasi Perda dan Misalokasi Anggaran, SIMPUL Perencana Bappenas*, Vol. 3, No. 2, Oktober
9. Ahmad Erani Yustika, 2005, Problems of the Indonesian Sugar Industry: An Institutional Economics Perspective, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 20, No. 4
10. Ahmad Erani Yustika, 2006, Pembangunan Perdesaan dan Formulasi Lembaga Keuangan, *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Vol. XXIII, No. 2, Juli
11. Ahmad Erani Yustika, 2007, Desentralisasi Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Rent-seeking, *Jurnal Transisi*, Vol. 1, No. 1, Mei
12. Rukavina Baksh dan Ahmad Erani Yustika, 2007, Sugarcane Farmers in East Java: Institutional Arrangement Perspective, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2, No. 1
13. Aldila Nuris Shoumi dan Ahmad Erani Yustika, 2007, Analisis Biaya Transaksi Kelompok Tani Padi Kontrak dan Nonkontrak (Studi Kasus di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, *Jurnal Ekonomi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2
14. Ahmad Erani Yustika dan Sugiyono, 2007, Perkembangan Ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2007, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik - Indef*, Vol. 9, No. 1
15. Ahmad Erani Yustika, 2007, Perdesaan, Pertanian, dan Modal: Tinjauan Ekonomi Kelembagaan, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, No. 2, Desember
16. Ahmad Erani Yustika, 2008, Sistem Politik, Pembangunan Ekonomi, dan Kebijakan Afirmatif, *Jurnal Katalis*, Edisi Khusus
17. Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, 2008, Zakat, Justice, and Social Equality. *Journal of Thoughts and Ideas*. Vol. I, August: 6-14, 2008
18. Ahmad Erani Yustika, 2008, The Transaction Cost of Sugarcane Farmers: An Explorative Study, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 23, No. 3
19. Ahmad Erani Yustika, 2008, Transaction Cost and Corporate Governance of Sugar Mills in Indonesia, *Journal of Corporate Ownership and Control*, Vol. 6, December
20. Ahmad Erani Yustika dan M. Fadhil Hasan, 2008, Situasi Pangan Ke Depan dan Kebijakan Ketahanan Pangan, *Jurnal Pangan*, No. 51/XVII/Juli - September
21. Ahmad Erani Yustika dan Eko Listiyanto, 2009, Ekonomi Politik Pertanian

- dan Kedaulatan Pangan, *Jurnal Transisi*, Vol. 3, No. 1
22. Faradilla Kutsiyah, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika, 2009, Performance Analysis of Community Block Grant through Pesantren in Madura, *Agro Economics Journal*, Vol. 27, No. 2
23. Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani, 2010, Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No. 3

Buku

1. Agus Suman dan Ahmad Erani Yustika, 1997, *Perspektif Baru Pembangunan Indonesia: Catatan Kritis terhadap Isu-Isu Aktual*, Brawijaya University Press and P3BE, Malang
2. Ahmad Erani Yustika, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
3. Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
4. Ahmad Erani Yustika, 2003, *Economic Analysis of Small Farm Households*, Brawijaya University Press, Malang
5. Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
6. Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (eds.), 2003, *Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*, Bayumedia, Malang
7. Ahmad Erani Yustika (ed.), 2005, *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*, Bayumedia, Malang
8. Ahmad Erani Yustika (ed.), 2005, *Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
9. Ahmad Erani Yustika, 2006, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, Bayumedia, Malang
10. Ahmad Erani Yustika, 2007, *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*, BPFE Unibraw, Malang
11. Ahmad Erani Yustika et. al., 2008, *Minyak, Pangan, dan Kemiskinan: Malpraktek Kebijakan Pemerintah*, INDEF, Jakarta
12. Ahmad Erani Yustika et. al., 2008, *Krisis Ekonomi, Kontestasi Politik, dan*

Proyeksi Ekonomi 2009, INDEF, Jakarta

13. Ahmad Erani Yustika *et. al.*, 2009, Krisis Keuangan, Stimulus Fiskal, dan Daya Saing Ekonomi Indonesia, INDEF, Jakarta
14. Ahmad Erani Yustika, 2009, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
15. Ahmad Erani Yustika (ed.), 2010, *Kejahatan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, PNM dan ITS Press, Surabaya
16. Ahmad Erani Yustika, 2010, *Kaleidoskop Perekonomian Indonesia: Peristiwa, Narasi, dan Analisis*, PNM dan ITS Press, Surabaya
17. Ahmad Erani Yustika *et. al.*, 2010, *Kerentanan Mikroekonomi di Balik Stabilitas Makroekonomi*, INDEF, Jakarta

Artikel dalam Buku

1. Ahmad Erani Yustika, 2003, Social Conflicts in Indonesia: Economic and Political Approaches. Dalam Regina Birner, Dodik Ridho Nurrochmat, and Slamet Rosyadi (eds.), *Sustainable Development: Socio-Economic and Environmental Problems, Focused on Indonesian Cases*, Cuvillier Verlag Göttingen, Germany
2. Ahmad Erani Yustika, 2003, Industrialisasi, Urbanisasi, dan Sektor Informal: Perspektif Kebijakan Lokal. Dalam Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (eds.), *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*, Bayumedia, Malang
3. Ahmad Erani Yustika, 2003, Gagasan Reformasi Ekonomi di Indonesia. Dalam Ahmad Erani Yustika (ed.), *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*, Bayumedia, Malang
4. Ahmad Erani Yustika, 2005, Restrukturisasi Kelembagaan Ekonomi di Sektor Perikanan. Dalam Ahmad Erani Yustika (ed.), *Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
5. Ahmad Erani Yustika, 2006, Dinamika Sektor Pertanian Indonesia: 2004-2006. Dalam Eep Saefullah Fatah (ed.), *2 Tahun Pemerintahan SBY – JK: Puisi Indah Prosa Buruk*, Simbiosis dan Sekolah Demokrasi Indonesia, Jakarta
6. Ahmad Erani Yustika, 2007, *Pasar, Informasi, dan Regulasi. Dalam Bagus Dharmawan (ed.), Esai-esai Nobel Ekonomi*, Penerbit Kompas, Jakarta

7. Ahmad Erani Yustika, 2009, Optimalisasi Sumber Daya Pertanian bagi Peningkatan Produksi Pertanian. Dalam Purwanto (ed.), *Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan*, LIPI, Jakarta
8. Purwanto dan Ahmad Erani Yustika, 2009, Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Sektor Pertanian. Dalam Purwanto (ed.), *Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan*, LIPI, Jakarta
9. Ahmad Erani Yustika, 2010, *Kejahatan Ekonomi, Kutukan SDA, dan Piramida Korban*. Dalam Ahmad Erani Yustika (ed.), *Kejahatan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, PNM dan ITS Press, Surabaya

Makalah

1. *The Role of Government in Economic Development: The Case Study in Indonesia*, seminar diselenggarakan oleh PPI Göttingen, 2001
2. Globalisasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, seminar diselenggarakan HMJ IESP Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya, 2002
3. Demokrasi Ekonomi: Ancaman Domestik dan Teror Globalisasi, seminar diselenggarakan BEM Universitas Merdeka, Malang, 2002
4. *The Structure of Poverty in Indonesia: A New Institutional Economics Perspective*, seminar diselenggarakan PPI Göttingen, Germany, 2003
5. *Development and Poverty in Indonesia: A New Institutional Economics Perspective*, IRSA International Conference, Bandung, 2003
6. *Transaction Cost Economics of Sugar Industry in East Java – Indonesia: A Comparative Study*, Tropentag Conference, Goettingen – Germany, Oktober 2003
7. *Urban Informal Sector: A New Institutional Economic Perspective*, IRSA International Conference, University of Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004
8. *Lack of Institutional Arrangements: The Root of Poverty in Agricultural Sector*, Tropentag Conference, Humboldt University, Berlin – Germany, 2004
9. Gelombang Ketiga Perekonomian Asia: Pembangunan Ekonomi Berbasis Etnis, seminar internasional diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bandung, 2005
10. Konsep Revitalisasi Pertanian di Jatim, seminar diselenggarakan oleh Bappeprov Jatim, Surabaya, 2005

11. Pembangunan Perdesaan dan Sektor Finansial: Perspektif Ekonomi Kelembagaan, Universitas Islam Kadiri - Program Pascasarjana, diselenggarakan dalam rangka kuliah umum Program Pascasarjana, Kediri, 2005
12. Imperialisme dan Utang Luar Negeri, seminar diselenggarakan oleh Koalisi Anti Utang (KAU) dan FISIP UNAIR, Surabaya, 2006
13. Tata Kelola Pemerintah dan Daya Saing Ekonomi di Jawa Timur, Universitas Islam Balitar, disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Launching Program Studi Akuntansi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar, 2006
14. Gagasan Ekonomi Kerakyatan: Perspektif Ekonomi Kelembagaan, seminar diselenggarakan oleh Nationalist Center dan DPC GMNI Malang Raya, 2006
15. Kebijakan Ekonomi, Keadilan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat, seminar diselenggarakan oleh BEM FE Unibraw, 2006
16. Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam, seminar diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) dan Universitas Negeri Malang (UM), Malang, 2006
17. Perdesaan, Pertanian, dan Modal: Pendekatan Ekonomi Kelembagaan, seminar dalam rangka Kongres ISEI, Manado, 2006
18. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Aplikasi, pidato ilmiah yang disampaikan dalam Acara Dies Natalis Universitas Brawijaya yang ke-44, Malang, 2007
19. Pembangunan Pertanian dari Perspektif Ekonomi Kelembagaan, disampaikan dalam Forum Diskusi Sosial Ekonomi Jurusan Sosek - Pertanian Fakultas Pertanian Unibraw, Malang, 2007
20. Prospek Ekonomi Indonesia 2007: Modal Aktual dan Ekspektasi Ekonomi, kuliah tamu diselenggarakan oleh FE UMM, Malang, 2007
21. Perkembangan dan Dinamika UMKM di Jawa Timur, seminar diselenggarakan oleh HMJM Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Malang, Malang, 2007
22. Potret Perekonomian Kota Malang: Potensi dan Ancaman, seminar diselenggarakan oleh BPS Malang, Malang, 2007
23. Pembangunan Ekonomi Kota Batu, seminar diselenggarakan oleh BPS Batu, Batu, 2007

24. Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Blitar, seminar diselenggarakan oleh BPS Kota Blitar, Blitar, 2007
25. Perbankan dan Pembiayaan UMKM, seminar diselenggarakan oleh ISMEI dan Fakultas Ekonomi Unair, Surabaya, 2007
26. Gurita Kemiskinan dan Negara Kesejahteraan, Diskusi Publik dalam rangka Dies Natalis LPME ECPOSE ke XVIII di FE Unej, Jember, 2007
27. Panduan Pembangunan Ekonomi 2008: Tanggapan atas RAPBN 2008, presentasi di depan DPD PAH IV, Jakarta, 2007
28. Desentralisasi dan Pembangunan Sumber Daya Alam, seminar diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Sosiologi Indonesia, Unibraw, Malang, 2007
29. Perkembangan Perekonomian Indonesia 2007, seminar diselenggarakan dalam rangka Indef *Outlook* 2008, Jakarta, 2007
30. Perkembangan Perekonomian Jawa Timur 2007, seminar diselenggarakan dalam rangka Insef *Outlook* 2008, Surabaya, 2007
31. Keadilan, Ekonomi Islam, dan Pembangunan, seminar diselenggarakan oleh CIEBERD FE Unair, Surabaya, 5 Januari 2008
32. Penetrasi Asing dalam Perekonomian Indonesia, seminar diselenggarakan oleh ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia), Jombang, 12 Februari 2008
33. Memetakan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, seminar diselenggarakan oleh HMJ Manajemen Fakultas Ekonomi - Universitas Jember, 3 Maret 2008
34. BLBI, Moral Hazard, dan Malpraktek BPPN, seminar diselenggarakan oleh BEM Unair, Surabaya, 12 Maret 2008
35. Krisis, BLBI, dan Kejahatan Sistemik, seminar diselenggarakan oleh BEM Universitas Brawijaya, Malang, Mei 2008
36. Menata Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Majelis Daerah Kahmi Probolinggo, 5 April 2008
37. Kejahatan Ekonomi dan Piramida Korban, seminar diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Jakarta, 12 April 2008
38. Problem dan Pembangunan UMKM di Indonesia, seminar diselenggarakan oleh ISMEI dan BEM FE Unair, Surabaya, 4 Mei 2008
39. Keadilan Sosial, Orde Pasar, dan Reformasi Terbalik, seminar diselenggarakan oleh *Reform Institute*, Jakarta, 21 Mei 2008

40. Intermediasi Perbankan dan Pembangunan Ekonomi, seminar diselenggarakan oleh BEM FE Unair, Surabaya, 18 Juni 2008
41. Prioritas Pemberdayaan UMKM di Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Kemitraan (*Partnership*), Malang, Juni 2008
42. *Review 10 Tahun Reformasi Ekonomi*, seminar diselenggarakan oleh The Habibie Center, Jakarta, 8 Juli 2008
43. Minyak, Pangan, dan Kemiskinan, seminar diselenggarakan oleh Indef, Jakarta, 10 Juli 2008
44. Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, seminar diselenggarakan oleh The Habibie Center, Jakarta, 31 Juli 2008
45. Spektrum Ekonomi Kelembagaan, kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi - Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008
46. Indonesia dalam Pusaran Ekonomi Politik Global, seminar diselenggarakan oleh Averroes, Malang, 14 Agustus 2008
47. Ekonomi Politik Pertanian dan Kesejahteraan Masyarakat, seminar diselenggarakan oleh BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 15 Agustus 2008
48. Pembangunan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Optimalisasi Pajak, seminar diselenggarakan oleh Kanwil Pajak Jawa Timur III, Jember, 15 Oktober 2008
49. Krisis, Pasar, dan Regulasi, seminar diselenggarakan CID (*Center of Information and Development*), Jakarta, 17 Oktober 2008
50. Fundamental, Struktur, dan Krisis Ekonomi, seminar diselenggarakan oleh IBS (*Institute Banking School*), Jakarta, 25 Oktober 2008
51. Ekonomi Politik Kebijakan Pemerintah, Konferensi INFID dengan tema "Dinamika Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Refleksi atas Masa Kini dan Menatap Masa Depan", Jakarta, 27 Oktober 2008
52. Krisis Global dan Ekonomi Jawa Timur, seminar diselenggarakan oleh DPRD Jatim (Komisi B), Jakarta, 9 November 2008
53. Kemandirian Ekonomi: Pangan, Energi, dan Keuangan, Simposium Nasional Kebangkitan Indonesia: 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa, PKB, Jakarta, 11 November 2008
54. *Market and Regulation: The Political Economy of Crisis*, seminar diselenggarakan oleh *Asia Foundation* dan USAID, Jakarta, 18 November 2008

55. Mendesain Fundamental Ekonomi Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Indef, Jakarta, 26 November 2008
56. Alternatif Model Ekonomi Indonesia, Simposium Nasional Ekonomi untuk memperingati Ulang Tahun Emas (50 tahun) Fakultas Ekonomi - Universitas Jayabaya, Jakarta, 27 November 2008
57. Krisis Ekonomi dan Proyeksi Ekonomi 2009, seminar diselenggarakan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Jakarta, 28 November 2008
58. Partai Politik, Demokrasi, dan Modal, seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Surabaya, 11 Desember 2008
59. Pembangunan Ekonomi, Kedaulatan Pertanian, dan Krisis Global, seminar diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Pertanian - Universitas Jember, 23 Desember 2008
60. Tata Kelola Pemerintah dan Kinerja Ekonomi, seminar diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB), Jakarta, 17 Januari 2009
61. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Program Doktor Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 19 Februari 2009
62. Fundamental Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, seminar diselenggarakan oleh ISMEI dan FE UMM, Malang, 3 April 2009
63. Menakar Efektivitas Stimulus Fiskal, seminar diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, Jakarta, 15 April 2009
64. Penguatan Pasar Domestik dan Restrukturisasi Sektor Industri, seminar diselenggarakan oleh Lemhanas, Jakarta, 21 April 2009
65. *Food Security Cooperation in East Asia*, seminar diselenggarakan oleh *Japan Forum on International Relations*, Tokyo, 1 Juli 2009
66. Isu-isu Strategis Perekonomian Nasional, seminar diselenggarakan oleh Indef, Jakarta, 13 Agustus 2009
67. Transmigrasi dan Ketahanan Pangan, seminar diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi, Jakarta, 15 Agustus 2009
68. Pembangunan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Reformasi Pajak, seminar diselenggarakan oleh FE Unri dan ISEI Riau, 22 Agustus 2009
69. Pembangunan Desa: Perspektif Ekonomi Kelembagaan, seminar diselenggarakan oleh Depdagri, Jakarta, 9 Oktober 2009

70. Pembangunan Pedesaan: Model dan Pendekatan, seminar diselenggarakan oleh PMD Depdagri, Jakarta, 12 Oktober 2009
71. Pembangunan Perdesaan: 5 Tahap Pengembangan, seminar diselenggarakan oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri, Jakarta, 29 Oktober 2009
72. Kinerja Ekonomi dan Agenda 2009-2014, seminar diselenggarakan oleh BEM FE UM, Malang, 22 November 2009
73. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, seminar diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Surabaya, 2 Desember 2009
74. Masalah Lahan dan Program Komoditas Unggulan, seminar diselenggarakan oleh BPN, Jakarta, 5 Desember 2009
75. Efektivitas Kebijakan Penargetan Inflasi: Pendekatan Ekonomi Kelembagaan, seminar diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Jakarta, 9 Desember 2009
76. Ekonomi Indonesia 2010: Potensi dan Ancaman, diskusi diselenggarakan oleh Rumah Baca Cerdas, Malang, 29 Desember 2009
77. Prospek Ekonomi Indonesia 2010 dan Peran Modal Sosial Perbankan, seminar diselenggarakan oleh BRI Bantul DIY, 31 Desember 2009
78. Prospek Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar 2011, Lokakarya yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar, Blitar, 15 Maret 2010
79. Prospek dan Problem Ekonomi Indonesia 2010, seminar diselenggarakan oleh KAMMI Wilayah Jawa-Bali-dan NTB, Malang, 27 Maret 2010
80. Tinjauan Ekonomi Politik Perekonomian Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 13 April 2010
81. Reformasi Total Sistem Perpajakan, seminar diselenggarakan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jakarta, 11 Mei 2010
82. OJK dan Nasib BPR, seminar diselenggarakan oleh Asosiasi Bankir Profesional BPR, Jakarta, 27 Mei 2010
83. Merumuskan Visi untuk Anak Negeri, disampaikan dalam acara bedah buku Khofifah Indar Parawansa, Surabaya, 30 Mei 2010
84. Peran Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi, seminar diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 3 Juni 2010

85. Pembangunan dan Agenda Kesejahteraan Rakyat, diskusi diselenggarakan oleh Kahmi Jatim, Surabaya, 19 Juni 2010
86. Pembangunan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Desain Kelembagaan, Diskusi Ahli Kompas, Jakarta, 1 Juli 2010
87. Dukungan LKM dalam Pengembangan UKM dan Koperasi, seminar diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Surabaya, 9 Juli 2010
88. Problem Inflasi Bahan Pangan, diskusi diselenggarakan oleh DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah), Jakarta, 16 Juli 2010
89. *Overview* Perekonomian Indonesia, seminar diselenggarakan oleh Indef, Jakarta, 29 Juli 2010
90. Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Pembangunan Ekonomi, Orasi Ilmiah Wisuda STIE Canda Bhirawa, Kediri, 31 Juli 2010
91. Ekonomi Pasar Sosial: Sebuah Kritik, seminar diselenggarakan oleh DEMOS dan Pascasarjana UI, Jakarta, 19 Agustus 2010
92. Struktur Persaingan Usaha di Sektor Perbankan, seminar diselenggarakan oleh Perbarindo Jatim, Surabaya, 22 September 2010

Editor/Mitra Bestari (Jurnal)

1. *Indonesian Journal of Applied Economics*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
2. *Jurnal Riset Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
3. *Jurnal Arise*, Jurusan Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
4. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Universitas Merdeka Malang
5. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Indef - Jakarta
6. *Jurnal Transisi*, Malang Corruption Watch
7. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado

Pengalaman Mengajar

1. Program Sarjana dan Pascasarjana - Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan, Ekonomi Politik, Ekonomi Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Teori dan Kebijakan Pembangunan, dan Metodologi Penelitian)

2. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan)
3. Program Magister Ilmu Administrasi Publik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara), Jakarta (Mata Kuliah Ekonomi Politik)
4. Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (Mata Kuliah Ekonomi Politik)

Lain-lain

Sejak 1991 - 2010 telah menerbitkan kurang lebih 500 artikel diberbagai surat kabar, tabloid, dan majalah nasional (Majalah Adil, Majalah Warta Ekonomi, Kompas, Suara Pembaruan, Investor Daily, Bisnis Indonesia, Jurnal Nasional, Koran Neraca, Kontan, Media Indonesia, Surabaya Post, Surabaya Pagi, Seputar Indonesia, Republika, Jawa Pos, Tabloid Inspirasi, dan lain-lain)